RENCANA KERJA (RENJA)
TA 2025

DINAS PERTANIAN
TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

“Sumatera Selatan Sejahtera, Unggul dan Terdepan”

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas rahmat dan ridho-Nya, maka Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan dapat diselesaikan dengan baik.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) SKPD Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan ini merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (RENSTRA) dan menjadi acuan segenap satuan kerja di lingkungan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan. Rencana Kerja (RENJA) ini disusun untuk menghasilkan rumusan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan 1 (satu) tahun yang akan datang serta sebagai dokumen perencanaan jangka pendek (Tahunan) untuk mensukseskan program-program yang telah direncanakan.

Pada kesempatan ini pula, kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu memberikan data-data dan masukan sehingga RENJA ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Demikian, semoga dokumen RENJA ini dapat bermanfaat sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan 1 (satu) tahun ke depan.

Palembang, 4 November 2024

Kepala Dinas,

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

Dr. Ir. H. R. Bambang Pramono, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 196703151990031004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR iii

DAFTAR ISI iv

DAFTAR TABEL vi

I. PENDAHULUAN 1

I.1. Latar Belakang 1

I.2. Landasan Hukum 8

I.3. Maksud dan Tujuan 10

1.3.1 Maksud 10

1.3.2. Tujuan 11

I.4. Sistematika Penulisan 12

II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH 14

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 14

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD 39

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD 45

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD 56

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 62

III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 64

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional Terkait Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan 64

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan 73

IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 78

4.1 Faktor-faktor yang Menjadi Bahan Pertimbangan terhadap Rumusan Program dan Kegiatan 78

4.2 Program dan Kegiatan Tahun 2025 87

V. PENUTUP 91

DAFTAR TABEL

Tabel II.1	Target dan Realisasi Tertib Administrasi dan Kepemerintahan Tahun 2022 dan Tahun 2023	16
Tabel II.2	Target dan Realisasi Produksi dan Produktivitas Padi Tahun 2023	18
Tabel II.3	Realisasi Produksi dan Produktivitas Padi Tahun 2022 dan Tahun 2023	23
Tabel II.4	Target dan Realisasi Produksi dan Produktivitas Jagung Tahun 2023	24
Tabel II.5	Realisasi Produksi dan Produktivitas Jagung Tahun 2022 dan Tahun 2023	25
Tabel II.6	Target dan Realisasi Produksi dan Produktivitas Kedelai Tahun 2023	26
Tabel II.7	Realisasi Produksi dan Produktivitas Kedelai Tahun 2022 dan Tahun 2023	27
Tabel II.8	Target dan Realisasi Produksi dan Produktivitas Jeruk Siam Tahun 2023	28
Tabel II.9	Realisasi Produksi dan Produktivitas Jeruk Siam Tahun 2022 dan Tahun 2023	28
Tabel II.10	Target dan Realisasi Produksi dan Produktivitas Durian Tahun 2023	29
Tabel II.11	Realisasi Produksi dan Produktivitas Durian Tahun 2022 dan Tahun 2023	30
Tabel II.12	Target dan Realisasi Produksi dan Produktivitas Duku Tahun 2023	31
Tabel II.13	Realisasi Produksi dan Produktivitas Duku Tahun 2022 dan Tahun 2023	31
Tabel II.14	Target dan Realisasi Produksi dan Produktivitas Nanas Tahun 2023	33

Tabel II.15 Realisasi Produksi dan Produktivitas Nanas Tahun 2022 dan Tahun 2023 33

Tabel II.16 Target dan Realisasi Produksi Tanaman Obat/Biofarmaka Tahun 2023 34

Tabel II.17 Realisasi Produksi Tanaman Obat/Biofarmaka Tahun 2022 dan Tahun 2023 35

Tabel II.18 Target dan Realisasi Produksi dan Produktivitas Cabai Tahun 2023 36

Tabel II.19 Realisasi Produksi dan Produktivitas Cabai Tahun 2022 dan Tahun 2023 36

Tabel II.20 Target dan Realisasi Produksi dan Produktivitas Bawang Merah Tahun 2023 37

Tabel II.21 Realisasi Produksi dan Produktivitas Bawang Merah Tahun 2022 dan Tahun 2023 38

Tabel T-C.31 Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 Provinsi Sumatera Selatan 57

Tabel IV.1 Data Tingkat Kemiskinan 17 Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan Tahun 2022 – 2023 86

Tabel T-C.32 Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Provinsi Sumatera Selatan 93

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan semula terbentuk tahun 1953 dengan nama Jawatan Pertanian Rakjat Propinsi Sumatera Selatan. Tahun 1970 berubah menjadi Dinas Pertanian Rakjat Propinsi Sumatera Selatan. Perubahan berlanjut pada tahun 1980 menjadi Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan.

Perubahan terjadi kembali pada tahun 2001, dikarenakan penggabungan dengan Dinas Peternakan, sehingga nomenklatur berubah menjadi Dinas Pertanian Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan. Perubahan nomenklatur ini terjadi lagi pada tahun 2003 menjadi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Propinsi Sumatera Selatan. Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan, terjadi perubahan nomenklatur dalam kata Propinsi menjadi Provinsi. Perubahan ini berlaku sampai dengan sekarang.

Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan yang selanjutnya disingkat Dinas Pertanian TPH adalah Organisasi Perangkat Daerah yang bergerak di Bidang Pertanian Sub Sektor Tanaman Pangan dan Hortikultura. Dikepalai oleh seorang Kepala Dinas yang membawahi Sekretariat dan 4 (empat) Bidang, yaitu Bidang Tanaman Pangan, Bidang

Hortikultura, Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian, dan Bidang Pengolahan, Pemasaran Hasil dan Penyuluhan Pertanian. Dinas Pertanian TPH juga membawahi 4 (empat) UPTD, yaitu UPTD Balai Pelatihan Penyuluhan Pertanian, UPTD Balai Perlindungan Tanaman, UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih TPH, dan UPTD Balai Pengembangan dan Produksi Benih TPH.

Dinas Pertanian TPH adalah Perangkat Daerah atau Organisasi atau Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Karena itu salah satu tugas Perangkat Daerah adalah membuat Rencana Kerja atau Renja. Renja Perangkat Daerah merupakan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan.

Laporan evaluasi hasil rencana kerja Perangkat Daerah adalah laporan yang berisi hasil evaluasi dari rencana kerja yang telah disusun oleh Perangkat Daerah selama satu tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, telah mewajibkan setiap Organisasi Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang tertuang dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, Pemerintah Daerah pada tahun 2023 memulai penyusunan rancangan awal RPJPD tahun 2025-2045 sesuai dengan yang tercantum dalam RKPD 2023, karena pada tahun 2024 Pemerintah Daerah akan melaksanakan Musrenbang RPJPD sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Pasal 11 ayat (4), Musrenbang dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya periode yang sedang berjalan. Periode RPJPD yang sedang berjalan berakhir pada tahun 2025. RPJPD yang sudah disusun pada tahun 2023, dapat menjadi pedoman dalam perumusan visi, misi, dan program calon kepala daerah yang akan mengikuti pilkada serentak pada tahun 2024 serta penyusunan RPJMD Teknokratik 2025-2030.

Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai organisasi pembantu Gubernur pada tahun 2024 menyusun Rencana Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan untuk Tahun 2025. Renja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan merupakan dokumen rencana pembangunan Pertanian yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Kementerian PPN/Bappenas telah Menyusun Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 dalam mendukung

perwujudan Visi Indonesia Emas 2045, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan. Membangun Indonesia Emas 2045 adalah cita-cita besar bangsa Indonesia yang tercermin dalam RPJPN 2025-2045 sebagai perayaan 100 tahun kemerdekaan Indonesia. Visi Indonesia Emas 2045 dilandasi oleh Visi Abadi Indonesia dalam Pembukaan UUD 1945 dengan mempertimbangkan modal dasar, megatren global, perubahan iklim, daya dukung dan daya tampung, serta pencapaian pembangunan sebelumnya.

Hal ini sejalan dengan Sasaran pembangunan keempat, yaitu Ketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan dengan pendekatan terpadu *Food, Energy, and Water* (FEW) *Nexus*, merupakan salah satu fondasi penting dalam mewujudkan ketahanan sosial budaya dan ekologi. Arah kebijakan dalam mendorong terwujudnya kemandirian pangan di Indonesia berfokus pada (1) peningkatan ketersediaan pangan nasional didukung melalui kegiatan-kegiatan (a) pengembangan kawasan-kawasan sentra produksi pangan di luar Pulau Jawa, (b) pengembangan pangan hewani, (c) pengembangan pangan nabati, (d) pengembangan pangan akuatik (*blue food*), serta (e) penguatan cadangan pangan; (2) peningkatan kualitas konsumsi, keamanan, serta penanganan kerawanan pangan dan gizi didukung melalui kegiatan-kegiatan (a) penganekaragaman konsumsi pangan, (b) biofortifikasi dan fortifikasi pangan, (c) pengembangan pangan lokal, serta (d) peningkatan keamanan pangan yang didukung melalui kegiatan pembangunan yang meningkatkan ketersediaan infrastruktur dan sarana-prasarana pengawasan pengujian pangan; (3) penguatan tata kelola pangan diwujudkan melalui (a) penguatan Satu Data Pangan yang terintegrasi dengan Satu Data Indonesia, (b) stabilisasi rantai pasok dan rantai nilai, serta (c) peningkatan pengelolaan susut dan sisa/limbah pangan.

Hasil turunan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Rencana Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, dalam penyusunannya perlu memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Renja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan.

Penyusunan Renja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan mengacu pada rancangan awal RKPD Provinsi Sumatera Selatan, Renstra Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan serta usulan dari masyarakat. Sebagai Dinas yang mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Pertanian, maka kebijakan yang diambil dalam penyusunan Renja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan selalu diselaraskan dengan kebijakan umum Kepala Daerah dan Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Pertanian sebagai pembantu Presiden dalam mencapai visi dan misi nasional. Dengan demikian diharapkan dapat menentukan arah perkembangan dalam meningkatkan kinerjanya, yang mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik lokal regional, nasional, maupun global.

Visi Kementerian Pertanian adalah ***"Pertanian Maju Berkelanjutan serta Bermanfaat bagi Rakyat Indonesia,"*** menuju Indonesia Emas 2045. Kolaborasi yang baik dan solid Kementerian Pertanian merupakan gerbang utama untuk membawa Indonesia menggapai kedaulatan pangan. Dalam tataran implementasi, konsep kedaulatan tersebut meliputi segala aspek di dalam sistem pangan, mulai dari aspek atau subsistem penguasaan tanah (reforma agraria), model produksi (agroekologi), pengolahan dan penyimpanan (cadangan pangan), distribusi (tata niaga), konsumsi hingga kelembagaannya. Majunya sektor pertanian ditandai dengan meningkatnya produksi dan produktivitas komoditas pangan serta mampu mencukupi kebutuhan dalam negeri (pangan mandiri) yang pada akhirnya mampu meningkatkan pendapatan petani. Kemajuan dan kemandirian di sektor pertanian diwujudkan dengan peningkatan hasil pengembangan penelitian terapan didukung oleh kualitas SDM dalam menggunakan teknologi modern berbasis kawasan pertanian.

Kegiatan perencanaan merupakan titik awal dalam menentukan keberhasilan dari sebuah pelaksanaan misi organisasi pemerintah. Organisasi pemerintah dituntut agar dapat membuat Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) yang jelas dan terukur dalam melakukan setiap kegiatan pembangunan. Dokumen Renja-SKPD tersebut merupakan dokumen resmi yang digunakan sebagai bahan dasar dalam pengusulan kegiatan dan anggaran penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Renja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan ini merupakan dokumen perencanaan yang berisikan arahan, tujuan, target, sasaran, kebijakan, strategi, program dan kegiatan pembangunan pertanian yang akan

dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan untuk 1 (satu) tahun ke depan (Tahun 2025). Dokumen ini disusun berdasarkan analisis strategis atas potensi, peluang, permasalahan mendasar dan tantangan terkini yang dihadapi pembangunan pertanian untuk jangka waktu 1 (satu) tahun ke depan.

Oleh karena itu, dokumen Renja ini sudah sepatutnya dijadikan acuan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan pertanian tahun 2025 secara menyeluruh, terintegrasi, efisien dan bersinergi baik di dalam maupun antar sektor terkait. Dokumen ini dilengkapi dengan indikator kinerja sehingga akuntabilitas pelaksana beserta organisasinya dapat dievaluasi pada tahun tersebut. Rencana Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan ini memuat program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025.

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengharuskan Pemerintah Daerah untuk menyusun Dokumen Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Provinsi (RPD) tahun 2024-2026. Selanjutnya seluruh Perangkat Daerah diperintahkan untuk menyusun Rencana Strategis Pemerintah Daerah (Renstra) Tahun 2024-2026. Kemudian mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD. Dokumen-dokumen inilah yang akan digunakan Penjabat Gubernur sebagai Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah.

Pembangunan Pertanian Sumatera Selatan Tahun 2025 mengakomodir program Penjabat Gubernur pertama dengan visi "***Membangun Sumsel Menjadi Lebih Maju***" dengan sasaran : mempercepat penanganan KarHutLah (Kebakaran Hutan dan Lahan), mensukseskan pelaksanaan PiLeg dan PilKaDa di Sumatera Selatan, menurunkan tingkat inflasi, menurunkan angka kemiskinan ekstrim dan kemiskinan lainnya, dan menurunkan angka stunting. Sedangkan visi misi Penjabat Gubernur selanjutnya adalah menaikkan perekonomian Sumatera Selatan karena *basic*-nya dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, karena ekonomi menjadi jantung, salah satu titik keberhasilan negara sehingga bisa terjaga (pertumbuhan ekonomi nasional) diangka 5,11% (lima koma sebelas persen).

Tahun 2025 pembangunan pertanian di Sumatera Selatan juga masih mengakomodir optimasi lahan rawa dan cetak sawah. Optimasi lahan rawa dan cetak sawah merupakan program Kementerian Pertanian (Kementan) untuk meningkatkan luas area pertanian dan produktivitas tanaman pangan. Program ini juga diharapkan dapat mewujudkan swasembada pangan nasional yang merupakan bagian dari langkah strategis Kementerian Pertanian dalam meningkatkan produktivitas pangan di Indonesia.

1.2. Landasan Hukum

Renja SKPD Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 disusun dengan berdasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaran Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
8. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);

11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 41 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas, dan Fungsi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan.
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023;

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud penyusunan Renja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh personil/aparat dinas dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas di Bidang Tanaman Pangan dan Bidang Hortikultura sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan di tahun 2024 dapat tercapai.
2. Mempermudah kontrol, koordinasi, analisa, monitoring dan evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal.

3. Memberikan informasi kepada pemangku-pemangku kepentingan (*stakeholders*) tentang rencana pembangunan di sektor pertanian dan kehutanan.
4. Menjadikan kerangka dasar dalam upaya peningkatan kualitas pembangunan di bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura.
5. Mewujudkan sinkronisasi pembangunan antara rancangan teknokratik RPJMD Provinsi Sumatera Selatan dengan rancangan Renstra Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan.

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Renja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Acuan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan dalam mengoperasionalkan RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Sebagai dasar dalam perumusan program dan kegiatan pembangunan pertanian dalam arti luas pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan selama tahun 2025.
3. Acuan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan terhadap target pencapaian yang tertuang pada rancangan Renstra Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026.

1.4. Sistematika Penulisan

Renja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 disusun dengan sistematika penulisan:

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Memuat tentang Renja SKPD, proses penyusunan Renja SKPD, keterkaitan antara Renja SKPD dengan Dokumen RKPD dan Renstra SKPD.

1.2. Landasan Hukum

Menguraikan apa yang menjadi Landasan Hukum di dalam penyusunan Renja Dinas Pertanian Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja SKPD.

1.3.1. Maksud

1.3.2. Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKP

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan

b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan

c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif maupun kombinasi keduanya.

BAB IV PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Proses penyusunan suatu perencanaan erat kaitannya dengan proses evaluasi, dari hasil evaluasi dapat teridentifikasi dua hal yaitu sejauh mana proses perencanaan pembangunan dilaksanakan oleh seluruh SKPD dan permasalahan-permasalahan yang menghambat pelaksanaan perencanaan pembangunan tersebut. Hasil evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan di tahun-tahun mendatang. Evaluasi kinerja untuk pelaksanaan kegiatan rencana kerja tahun lalu dan capaian Renstra adalah sebagai umpan balik (*Feed Back*) kinerja yang telah dilaksanakan guna untuk mendorong adanya produktivitas kinerja di masa yang akan datang.

Pengertian Evaluasi Kinerja adalah analisis hasil capaian kinerja untuk mencari hubungan sebab akibat antara pelaksanaan kegiatan/program dan hasilnya, disamping mengidentifikasi dan memilih permasalahan serta menjelaskan hasil pengukuran kinerja (kegagalan dan keberhasilan). Tujuan dari evaluasi kinerja adalah untuk mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai, sehingga dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan dan pelaksananan program kegiatan di masa yang akan datang.

Indikator kinerja adalah merupakan pengukuran kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura periode Rencana Strategis Tahun 2024-2026.

Pengukuran kinerja merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan dan/atau kegagalan dari pelaksanaan pelayanan kedinasan yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan, yang secara operasional dilaksanakan setiap tahun melalui program dan kegiatan.

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dimaksudkan untuk mengetahui dan menilai apakah pelaksanaan rencana pembangunan sudah sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan, untuk mengetahui kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan di lapangan dan untuk bahan pertimbangan apakah program dan kegiatan tersebut sudah mencapai target sasaran sehingga tidak perlu lagi untuk direncanakan pada tahun berikutnya. Fokus utama evaluasi diarahkan pada pelaksanaan rencana pembangunan dan pencapaian target kinerja berdasarkan tolak ukur yang ditetapkan pada saat penyusunan perencanaan.

Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan–kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura pada tahun yang lalu dan membandingkan dengan capaian sesuai target jangka menengah.

Kualitas Renja Perangkat Daerah yang disusun sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam menyusun Renja yang berkualitas diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja sebelumnya, yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra perangkat daerah.

Adapun capaian untuk masing-masing sasaran dan indikator kinerja adalah sebagai berikut:

1. Tertib Administrasi dan Tata Kepemerintahan

Pencapaian sasaran tertib administrasi dan tata kepemerintahan pada tahun 2022 dan tahun 2023 dilaksanakan melalui 7 indikator sasaran pada Tabel II.1 sebagai berikut:

Tabel II.1. Target dan Realisasi Tertib Administrasi dan Kepemerintahan Tahun 2022 dan Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022			Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Persentase Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (%)	%	100	100	100	100	92,80	92,80
2.	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)	%	100	100	100	99,98	96,40	96,40
3.	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (%)	%	100	100	100	100	99,62	99,62

4.	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (%)	%	100	100	100	100	5,12	5,12
5.	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)	%	100	100	100	100	75,44	75,44
6.	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)	%	100	100	100	100	100	100
7.	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)	%	100	100	100	100	98,01	98,01
8.	Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	%	-	-	-	100	93,45	93,45

Untuk tahun 2022 pencapaian untuk sasaran tertib administrasi dan tata kepemerintahan tercapai 100% melalui 7 (tujuh) indikator kinerja sedangkan untuk tahun 2023 terdapat 8 (delapan) indikator kinerja dan pencapaian untuk sasaran tertib administrasi dan tata kepemerintahan hanya mencapai 82,60% hal ini dikarenakan pada tahun 2023 ada beberapa kegiatan yang belum dibayarkan sehingga menjadi hutang yang akan dibayarkan pada tahun 2024 dan TPP Bulan Desember 2023 tidak dibayarkan.

2. Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan Strategis

Capaian produksi tanaman pangan tahun 2022-2023 berfokus pada peningkatan produksi, produktivitas dan mutu hasil tanaman pangan. Kegiatan ini menjadi terobosan dalam rangka mendukung mewujudkan kedaulatan dan ketahanan pangan. Kegiatan pengembangan padi, jagung, kedelai dan pangan lokal, pengelolaan perbenihan, pengendalian OPT, dan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP) berbasis korporasi petani menjadi suatu terobosan untuk mengubah sistem pertanian yang kurang produktif menjadi lebih produktif. Program peningkatan produksi, produktivitas dan mutu hasil tanaman pangan menjadi salah satu pendukung agenda pembangunan pertanian yang mampu mendongkrak dan berkontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Selatan.

a. Capaian Kinerja Produksi dan Produktivitas Padi Tahun 2023

Tabel II.2. Target dan Realisasi Produksi dan Produktivitas Padi Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		Capaian Tahun 2023 (%)
			Target	Realisasi	
1.	Produksi Padi	Ton	3.943.061	2.832.774	71,84
2.	Produktivitas Padi	Ku/Ha	50,76	56,19	110,7

Berdasarkan data yang disajikan pada tabel II.2 dapat data bahwa capaian kinerja produksi dan produktivitas padi pada tahun 2023 berdasarkan Data KSA (Kerangka Sampel Area) adalah sebesar 2.832.774 ton dan 56,19 Ku/Ha. Jika dilihat dari capaian tersebut, hanya capaian produksi yang tidak mencapai target yang ditetapkan pada Renstra 2024-2026 yaitu sebesar 3.943.061 ton, sedangkan capaian produktivitas tahun 2023 sebesar 56,19 Ku/Ha

dan telah melebihi target yang ditetapkan pada Renstra 2024-2026 yaitu sebesar 50,76 Ku/Ha.

Penetapan target produksi yang diperoleh dari Bidang Teknis yang berasal dari target Kabupaten/Kota masih terlalu tinggi, padahal capaian setelah setelah adanya penetapan angka luas baku lahan sawah yang jauh menurun dari luas sebelumnya mengakibatkan capaian produksi berkisar di bawah 3 juta ton.

Tidak tercapainya target produksi di Tahun 2023 juga dikarenakan target realisasi Tahun 2023 masih berdasarkan luas tanam LBS (Luas Baku Sawah) di Tahun 2018, sedangkan pada Tahun 2019 terjadi penurunan sebesar 151.300,83 Ha yang tidak termasuk dalam LBS (Luas Baku Sawah) sehingga penghitungan target realisasi awal berubah dan belum bisa diganti karena sudah tercantum dalam Renstra 2019-2023. Selain itu, dua tahun terakhir kondisi iklim di Sumatera Selatan mengalami Hatrick Basah yang curah hujannya cukup tinggi sehingga di beberapa Lahan Rawa khususnya Lahan Rawa Lebak banyak yang tidak melakukan pertanaman akibat banjir. Adanya perubahan metode pendekatan penghitungan produksi menjadi Kerangka Sampel Area (KSA) sehingga ada beberapa lahan produksinya tinggi tetapi tidak termasuk dalam KSA sehingga tidak dapat dihitung produksinya.

Terkait dengan adanya pengurangan luas Lahan Baku Sawah di Provinsi Sumatera Selatan, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan telah melakukan beberapa upaya antara lain melakukan Updating LBS dengan instansi terkait lainnya seperti ATR/BPN.

Sedangkan adanya perubahan metode pendekatan penghitungan produksi juga sudah ditindaklanjuti oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan dengan melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dan instansi terkait melalui perubahan lokasi titik sampel KSA yang bukan di Lahan Sawah.

Terkait dengan produktivitas padi yang melebihi dari target yang ditetapkan di dalam Renstra tahun 2023, dikarenakan adanya penggunaan benih unggul bermutu (Bantuan Pemerintah), percepatan tanam khususnya di wilayah Rawa baik Rawa Lebak maupun Rawa Pasang Surut, penerapan teknologi spesifik lokasi, penggunaan alsintan pertanian untuk mempercepat proses produksi dan mengurangi susut hasil serta adanya pendampingan dari tenaga pendamping di Lapangan (PPEP). Capaian angka produktivitas padi tahun 2023 ini merupakan capaian produktivitas tertinggi yang pernah dicapai dan capaian ini melebihi capaian nasional. Tercapainya produktivitas padi di Tahun 2023 juga tidak terlepas dari Dukungan Pemerintah melalui Program dan Kegiatan yang dilaksanakan di Dinas Pertanian TPH Provinsi Sumatera Selatan baik yang berasal dari Dana APBD maupun Dana APBN.

- Kegiatan yang berasal dari Dana APBD, diantaranya:
  - Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
    1. Kegiatan Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian
       - Kegiatan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian;
    2. Kegiatan Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman berupa Pengawasan Peredaran Benih Tanaman
       - Pengelolaan Penerbitan Sertifikasi Benih;

- Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura;
- Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan

❖ Kegiatan yang berasal dari Dana APBN, diantaranya:

1. Kegiatan Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup berupa :
   - Sarana Pasca Panen sebanyak 14 unit, antara lain
     - ✓ *Power Thresher* sebanyak 5 unit;
     - ✓ *Corn Sheller* sebanyak 2 unit;
     - ✓ *Corn Sheller Mobile* sebanyak 1 unit;
     - ✓ *Power Thresher* Multiguna Kedelai sebanyak 3 unit;
     - ✓ *Power Thresher Mobile* sebanyak 3 unit.
   - Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan sebanyak 5 unit, antara lain :
     - ✓ Kabupaten Empat Lawang sebanyak 1 unit;
     - ✓ Kota Pagaralam sebanyak 2 unit;
     - ✓ Kabupaten Ogan Ilir sebanyak 1 unit;
     - ✓ Kabupaten Oku Selatan sebanyak 1 unit.

2. Sarana Pengembangan Kawasan berupa :
   - Kawasan Padi (Padi Lahan Kering 300 Ha), antara lain
     - ✓ Kabupaten OKU Timur seluas 150 Ha
     - ✓ Kabupaten OKU Selatan seluas 150 Ha

     Kawasan Padi (Padi Rawa 3.000 Ha), antara lain :
     - ✓ Kabupaten OKI seluas 2.000 Ha
     - ✓ Kabupaten Ogan Ilir seluas 1.000 Ha
   - Kawasan Padi Kaya Gizi (*Biofortifikasi*) seluas 1.000 Ha, antara lain :
     - ✓ Kabupaten OKU seluas 200 Ha;

- ✓ Kabupaten Muara Enim seluas 200 Ha;
- ✓ Kabupaten Musi Rawas seluas 400 Ha;
- ✓ Kabupaten Ogan Ilir seluas 200 Ha.

3. Kegiatan Pengelolaan Sistem Perbenihan Tanaman Pangan berupa :
   - Area Penyaluran Benih Padi (Padi Inbrida seluas 20.000 Ha) antara lain :
     - ✓ Kabupaten OKU seluas 514 Ha;
     - ✓ Kabupaten OKI seluas 3.000 Ha;
     - ✓ Kabupaten Muara Enim 1.000 Ha;
     - ✓ Kabupaten Lahat seluas 2.000 Ha;
     - ✓ Kabupaten Musi Banyuasin seluas 3.500 Ha;
     - ✓ Kabupaten OKU Selatan seluas 1.000 Ha;
     - ✓ Kabupaten OKU Timur seluas 2.000 Ha;
     - ✓ Kabupaten Ogan Ilir seluas 1.736 Ha;
     - ✓ Kabupaten Empat Lawang seluas 2.000 Ha;
     - ✓ Kabupaten PALI seluas 750 Ha;
     - ✓ Kabupaten Musi Rawas Utara seluas 1.000 Ha;
     - ✓ Kota Palembang seluas 500 Ha; dan
     - ✓ Kota Pagaralam seluas 1.000 Ha.
4. Kegiatan Pengelolaan Sistem Perbenihan Tanaman Pangan berupa Sertifikasi Benih Padi sebanyak 3.022 Produk dan Laporan Pengawasan Peredaran Benih Tanaman Pangan sebanyak 3.000 Laporan.
5. Kegiatan Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup berupa Benih Sumber Padi yang dihasilkan sebanyak 20.000 unit.
6. Kegiatan Sarana Pengembangan Kawasan berupa Areal Pengendalian OPT Tanaman Pangan sebanyak 100 Ha.

Tabel II.3. Realisasi Produksi dan Produktivitas Padi Tahun 2022 dan Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		Selisih
			2022	2023	
1.	Produksi Padi	Ton	2.775.069	2.832.774	57.705
2.	Produktivitas Padi	Ku/Ha	54,06	56,19	2,13

Berdasarkan Tabel II.3, produksi padi pada tahun 2022 sebesar 2.775.069 ton dan pada tahun 2023 sebesar 2.832.774 ton, yang berarti terjadi kenaikan jumlah produksi padi dari tahun 2022 ke tahun 2023 sebesar 57.705 ton atau 2,08%. Produktivitas padi pada tahun 2022 sebesar 54,06 Ku/Ha dan pada tahun 2023 sebesar 56,19 Ku/Ha, yang berarti produktivitas padi dari tahun 2022 ke tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 2,13 Ku/Ha atau 3,94%.

Capaian produksi padi tahun 2023 lebih tinggi dibandingkan dengan capaian tahun 2022, disebabkan karena :

1) Penggunaan benih unggul bermutu sehingga terjadinya peningkatan produktivitas padi;
2) Penerapan teknologi spesifik lokasi;
3) Penggunaan alsintan untuk percepatan proses produksi dan mengurangi susut hasil;
4) Adanya pendampingan dari PPL, POPT, PBR serta PPEP di lapangan;
5) Adanya kegiatan penyediaan sarana produksi tepat waktu;
6) Adanya pengawasan mutu, penyediaan dan peredaran benih unggul.

b. Capaian Kinerja Produksi dan Produktivitas Jagung Tahun 2023

Capaian kinerja produksi jagung tahun 2022 sebesar 889.693 ton dari target sebesar 943.537 ton, sehingga pencapaian produksi adalah 94,29% dari target yang ditentukan. Selanjutnya capaian kinerja produktivitas jagung tahun 2022 sebesar 63,39 Ku/Ha dari target sebesar 65,09 Ku/Ha sehingga pencapaian produktivitasnya 97,39% dari target yang ditentukan, sebagaimana disajikan pada tabel II.4 berikut:

Tabel II.4. Target dan Realisasi Produksi dan Produktivitas Jagung Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		Capaian Tahun 2023 (%)
			Target	Realisasi	
1.	Produksi Jagung	Ton	963.375	826.836,19	85,83
2.	Produktivitas Jagung	Ku/Ha	65,11	62,36	95,78

Capaian produksi dan produktivitas jagung tahun 2023 tidak mencapai target. Salah satu penyebab dari rendahnya capaian itu yaitu karena mulai tahun 2023 penghitungan Luas Tanam Jagung berdasarkan KSA sehingga lokasi-lokasi yang bukan merupakan titik KSA tidak dihitung. Selain itu sebagian besar pertanaman jagung adalah merupakan lahan persawahan, sehingga pada saat komoditi padi mengalami kemunduran tanam menyebabkan di beberapa Lokasi tidak melakukan penanaman jagung dan sebagian lokasi lainnya juga melakukan mundur tanam. Kemudian, sebagian besar usahatani ini hanya mengandalkan swadaya petani jagung.

Tabel II.5. Realisasi Produksi dan Produktivitas Jagung Tahun 2022 dan Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		Selisih
			2022	2023	
1.	Produksi Jagung	Ton	1.012.791,35	826.836,19	(185.955,16)
2.	Produktivitas Jagung	Ku/Ha	71,05	62,36	(8,69)

Berdasarkan Tabel II.5, produksi jagung pada tahun 2022 sebesar 1.012.791,35 ton dan pada tahun 2023 sebesar 826.836,19 ton, yang berarti terjadi penurunan jumlah produksi jagung dari tahun 2022 ke tahun 2023 sebesar 185.995,16 ton atau sebesar 18,36%. Produktivitas jagung pada tahun 2022 sebesar 71,05 Ku/Ha dan pada tahun 2023 sebesar 62,36 Ku/Ha, yang berarti produktivitas jagung dari tahun 2022 ke tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 8,69 Ku/Ha atau 12,23%. Adanya penurunan capaian produksi dikarenakan adanya curah hujan yang cukup tinggi sehingga banyak lahan-lahan pertanaman jagung yang mengalami kebanjiran sehingga gagal tanam dan panen. Selain itu di tahun 2023 alokasi bantuan komoditi jagung hanya berupa benih jagung saja untuk seluas 5.000 Ha tanpa bantuan saprodi (APBN Tugas Pembantuan).

c. Capaian Kinerja Produksi dan Produktivitas Kedelai Tahun 2023

Capaian kinerja produksi kedelai tahun 2022 sebesar 48,79 ton dari target sebesar 2.909 ton, sehingga pencapaian produksi adalah 1,68% dari target yang ditentukan. Selanjutnya capaian kinerja produktivitas kedelai tahun 2022 sebesar 14,65 Ku/Ha dari target sebesar 12,38 Ku/Ha sehingga pencapaian produktivitasnya 118,34% dari target yang ditentukan, sebagaimana disajikan pada tabel II.6 berikut:

Tabel II.6. Target dan Realisasi Produksi dan Produktivitas Kedelai Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		Capaian Tahun 2023 (%)
			Target	Realisasi	
1.	Produksi Kedelai	Ton	2.909	48,79	(2.860,21)
2.	Produktivitas Kedelai	Ku/Ha	12,38	14,65	2,27

Capaian kinerja produksi kedelai pada tahun 2023 lebih kecil dari target tahun 2022. Tidak tercapainya target produksi 2022 disebabkan karena adanya penurunan luas tanam dimana luas tanam ini masih sangat tergantung dengan adanya program bantuan pemerintah. Sedangkan untuk bantuan di tahun 2023 ini melalui Kegiatan Sarana Pengembangan Kawasan Kedelai seluas 717 Ha namun realisasi tanam baru bisa dilaksanakan di Triwulan IV, sehingga *carry over* di Tahun 2024. Sedangkan untuk pertanaman secara swadaya masih jarang dilaksanakan disebabkan petani lebih memilih komoditi lain yang lebih menguntungkan dan perawatan pertanaman yang lebih mudah serta pemasaran yang lebih baik.

Sedangkan untuk Produktivitas kedelai pada tahun 2023 telah melampaui target Renstra 2019-2023, yaitu sebesar 14,65 Ku/Ha. Hal ini dipengaruhi oleh banyak faktor diantaranya adalah adanya iklim yang mendukung, rendahnya serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT), ketepatan jadwal tanam tanaman dan teknik budidaya yang digunakan petani.

Sedangkan untuk realisasi produksi dan produktivitas tanaman kedelai tahun 2022 dan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel II.7 di bawah ini :

Tabel II.7. Realisasi Produksi dan Produktivitas Kedelai Tahun 2022 dan Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		Selisih
			2022	2023	
1.	Produksi Kedelai	Ton	392	48,79	(343,21)
2.	Produktivitas Kedelai	Ku/Ha	15,14	14,65	(0,49)

Berdasarkan Tabel II.7, produksi kedelai pada tahun 2022 sebesar 392 ton dan pada tahun 2023 sebesar 48,79 ton, yang berarti terjadi penurunan jumlah produksi kedelai dari tahun 2022 ke tahun 2023 sebesar 343,21 ton atau 87,55%. Produktivitas kedelai pada tahun 2022 sebesar 15,14 Ku/Ha dan pada tahun 2023 sebesar 14,65 Ku/Ha, yang berarti produktivitas kedelai dari tahun 2022 ke tahun 2023 juga mengalami penurunan sebesar 0,49 Ku/Ha atau 3,24%.

3. Produksi dan Produktivitas Tanaman Hortikultura

Komoditi Tanaman Hortikultura yang menjadi salah satu indikator kinerja utama Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan, meliputi Cabai, Bawang Merah, Jeruk Siam, Duku, Durian, Nanas dan Tanaman Obat.

a. Capaian Kinerja Produksi dan Produktivitas Jeruk Siam Tahun 2023

Capaian kinerja produksi dan produktivitas tanaman hortikultura tahun 2023 didasarkan pada Data ATAP Tahun 2023. Capaian kinerja produksi jeruk siam tahun 2022 sebesar 44.468 ton dari target sebesar 48.427 ton, sehingga terjadi penurunan pencapaian produksi sebesar 91,82 % dari target yang ditentukan. Selanjutnya capaian kinerja produktivitas jeruk siam tahun 2022 sebesar 362 Ku/Ha dari target sebesar 521,40 Ku/Ha sehingga pencapaian produktivitasnya turun sebesar 69,43 % dari target yang ditentukan, sebagaimana disajikan pada tabel II.8 berikut:

Tabel II.8. Target dan Realisasi Produksi dan Produktivitas Jeruk Siam Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		Capaian Tahun 2023 (%)
			Target	Realisasi	
1.	Produksi Jeruk Siam	Ton	53.517	42.958	80,27
2.	Produktivitas Jeruk Siam	Ku/Ha	531,80	37,27	7,01

Capaian kinerja produksi dan produktivitas Jeruk Siam pada tahun 2023 lebih kecil dari target tahun 2022. Meskipun capaian produksi dan produktivitas jeruk siam di Tahun 2023 belum mencapai target yang telah ditetapkan karena tidak adanya bantuan dari Pemerintah baik dari APBD maupun APBN. Sedangkan di tahun sebelumnya (2022) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan melaksanakan Kegiatan Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura di Kota Pagar Alam seluas 40 Ha melalui Dana APBN Tugas Perbantuan.

Tabel II.9. Realisasi Produksi dan Produktivitas Jeruk Siam Tahun 2022 dan Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		Selisih
			2022	2023	
1.	Produksi Jeruk Siam	Ton	44.468	42.958	(1.510)
2.	Produktivitas Jeruk Siam	Ku/Ha	36,17	37,27	1,1

Berdasarkan Tabel II.9, produksi jeruk pada tahun 2022 sebesar 44.468 ton dan pada tahun 2023 sebesar 42.958 ton, yang berarti terjadi penurunan jumlah produksi jeruk siam dari tahun 2022 ke tahun 2023 sebesar 1.510 ton atau 3,39%. Produktivitas jeruk siam pada tahun 2022 sebesar 36,17 Ku/Ha

dan pada tahun 2023 sebesar 37,27 Ku/Ha, yang berarti produktivitas jeruk dari tahun 2022 ke tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 1,1 Ku/Ha atau 3,04%.

Produksi jeruk siam tahun 2023 lebih kecil dibandingkan dengan produksi jeruk siam di tahun 2022, hal ini disebabkan karena adanya serangan hama dan penyakit batang jeruk serta kondisi iklim yang kurang baik dan adanya tanaman produktif yang belum panen menyebabkan penurunan jumlah produksi sebesar 1.510 Ton atau sebesar 3,39%. Sedangkan, capaian produktivitas Jeruk Siam tahun 2023 lebih tinggi daripada tahun 2022. Hal ini disebabkan karena adanya dukungan Kegiatan Kegiatan Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura berupa penggunaan bibit bersertifikat.

b. Capaian Kinerja Produksi dan Produktivitas Durian Tahun 2023

Capaian kinerja produksi durian tahun 2023 sebesar 39.671 ton dari target sebesar 30.395 ton, sehingga pencapaian produksi adalah 130,52% dari target yang ditentukan. Selanjutnya capaian kinerja produktivitas durian tahun 2023 sebesar 9,70 Ku/Ha dari target sebesar 67,64 Ku/Ha sehingga pencapaian produktivitasnya 14,34% dari target yang ditentukan, sebagaimana disajikan pada tabel II.10 berikut;

Tabel II.10. Target dan Realisasi Produksi dan Produktivitas Durian Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		Capaian Tahun 2023 (%)
			Target	Realisasi	
1.	Produksi Durian	Ton	30.395	39.671	130,52
2.	Produktivitas Durian	Ku/Ha	67,74	9,70	(14,32)

Capaian produksi Durian tahun 2023 telah melampaui target produksi tahun 2022 berdasarkan Renstra. Hal ini sangat membanggakan karena Durian merupakan komoditi unggulan di Sumatera Selatan sehingga baik produksi maupun produktivitasnya harus terus ditingkatkan untuk melestarikan komoditi unggulan ini. Hal ini juga karena pada tahun 2023 ada alokasi bantuan APBD untuk komoditi durian terdapat di Kota Lubuk Linggau sebanyak 50 Ha.

Tabel II.11. Realisasi Produksi dan Produktivitas Durian Tahun 2022 dan Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		Selisih
			2022	2023	
1.	Produksi Durian	Ton	40.615	39.671	(944)
2.	Produktivitas Durian	Ku/Ha	10,94	9,70	(1,24)

Berdasarkan Tabel II.11, produksi durian pada tahun 2022 sebesar 40.615 ton dan pada tahun 2023 sebesar 39.671 ton, yang berarti terjadi penurunan jumlah produksi durian dari tahun 2022 ke tahun 2023 sebesar 944 ton atau 2,32 %. Produktivitas durian pada tahun 2022 sebesar 10,94 Ku/Ha dan pada tahun 2023 sebesar 9,70 Ku/Ha, yang berarti produktivitas durian dari tahun 2022 ke tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 1,24 Ku/Ha atau turun sebesar 11,33%.

Capaian produksi Durian tahun 2023 mengalami penurunan dibandingkan dengan capaian tahun 2022, hal ini dikarenakan adanya penurunan Luas Panen yang disebabkan oleh faktor cuaca yang kurang baik dan sangat mempengaruhi fase generatif (pembungaan) sehingga banyak bunga Durian gugur, adanya alih fungsi lahan dari pertanaman Durian ke komoditi lainnya, serta banyak tanaman yang sudah tidak produktif lagi karena sudah tua.

c. Capaian Kinerja Produksi dan Produktivitas Duku Tahun 2023

Capaian kinerja produksi duku tahun 2023 sebesar 15.326 ton dari target sebesar 49.880 ton, sehingga pencapaian produksi hanya 69,27 % dari target yang ditentukan. Selanjutnya capaian kinerja produktivitas duku tahun 2023 sebesar 6,79 Ku/Ha dari target sebesar 124,40 Ku/Ha sehingga pencapaian produktivitasnya 94,54% dari target yang ditentukan, data ini dapat dlihat seperti yang disajikan pada tabel II.12 berikut:

Tabel II.12. Target dan Realisasi Produksi dan Produktivitas Duku Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		Capaian Tahun 2023 (%)
			Target	Realisasi	
1.	Produksi Duku	Ton	49.880	15.326	69,27
2.	Produktivitas Duku	Ku/Ha	124,40	6,79	94,54

Capaian produksi dan produktivitas duku di tahun 2023 lebih rendah dibandingkan tahun 2022, hal disebabkan karena pada tahun 2023 terjadi perubahan iklim yang cukup ekstrim dan mengakibatkan banyaknya bakal buah yang gugur, alih fungsi lahan ke tanaman Perkebunan seperti karet dan sawit juga menyebabkan penurunan produksi buah duku.

Tabel II.13. Realisasi Produksi dan Produktivitas Duku Tahun 2022 dan Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		Selisih
			2022	2023	
1.	Produksi Duku	Ton	17.573	15.326	(2.247)
2.	Produktivitas Duku	Ku/Ha	9,03	6,79	(2,24)

Berdasarkan Tabel II.13, produksi duku pada tahun 2022 sebesar 17.573 ton dan pada tahun 2023 sebesar 15.326 ton, yang berarti terjadi penurunan jumlah produksi duku dari tahun 2022 ke tahun 2023 sebesar 2.247 ton atau 12,79%. Produktivitas duku pada tahun 2022 sebesar 9,03 Ku/Ha dan pada tahun 2023 sebesar 6,79 Ku/Ha, yang berarti produktivitas duku dari tahun 2022 ke tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 2,24 Ku/Ha atau 24,81%. Pada tahun 2023 hanya duku Rasuan yang berasal dari Kabupaten OKU Timur yang menghasilkan kualitas panen yang bagus.

Capaian produksi dan produktivitas Duku tahun 2023 belum mencapai target produksi tahun 2023 berdasarkan Renstra. Hal ini dikarenakan tanaman duku biasanya banyak ditanam di dekat daerah aliran Sungai sehingga sangat membutuhkan air untuk proses bertumbuh kembang dan berbuah, sedangkan di sepanjang tahun 2023 Provinsi Sumatera Selatan mengalami kekeringan yang sangat Panjang sehingga mempengaruhi proses pembuahan tanaman duku. Upaya yang akan terus dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan yaitu dengan tetap menjalankan Program dan Kegiatan yang mendukung peningkatan produksi dan produktivitas hortikultura.

d. Capaian Kinerja Produksi dan Produktivitas Nanas Tahun 2023

Capaian kinerja produksi nanas tahun 2023 sebesar 567.120 ton dari target sebesar 138.188 ton, sehingga pencapaian produksi adalah 410.40% dari target yang ditentukan. Capaian kinerja produktivitas nanas tahun 2022 sebesar 3.218 Ku/Ha dari target sebesar 692,70 Ku/Ha sehingga pencapaian

produktivitasnya 464,56% dari target yang ditentukan, sebagaimana disajikan pada tabel II.14 berikut:

Tabel II.14. Target dan Realisasi Produksi dan Produktivitas Nanas Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		Capaian Tahun 2023 (%)
			Target	Realisasi	
1.	Produksi Nanas	Ton	138.412	477.430	244,93
2.	Produktivitas Nanas	Ku/Ha	693,80	258,75	62,70

Capaian kinerja produksi dan produktivitas Nanas pada tahun 2023 lebih tinggi dibanding target tahun 2022. Hal ini disebabkan karena peningkatan produksi dan produktivitas nanas yang terjadi di Kabupaten Ogan Ilir dan Kota Prabumulih, adanya dukungan akses pemasaran melalui perbaikan jalan lalu lintas dari kebun ke jalan sehingga petani dapat menjual hasil panen nanas ke pasar induk di luar pulau dan panen kali ini jenis atau varietas nanas yang dihasilkan berbeda dari jenis yang biasa (buah lebih besar dan lebih manis).

Tabel II.15. Realisasi Produksi dan Produktivitas Nanas Tahun 2022 dan Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		Selisih
			2022	2023	
1.	Produksi Nanas	Ton	567.120	477.430	(89.690)
2.	Produktivitas Nanas	Ku/Ha	321,85	258,75	(63,1)

Berdasarkan Tabel II.15, produksi nanas pada tahun 2022 sebesar 567.120 ton dan pada tahun 2023 sebesar 477.430 ton, yang berarti terjadi penurunan jumlah produksi nanas dari tahun 2022 ke tahun 2023 sebesar ton 89.690 atau 15,81 %.

Produktivitas nanas pada tahun 2022 sebesar 321,85 Ku/Ha dan pada tahun 2023 sebesar 258,75 Ku/Ha, yang berarti produktivitas nanas dari tahun 2022 ke tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 63,1 Ku/Ha atau 19,60 %.

Capaian produksi dan produktivitas Nanas tahun 2023 mengalami penurunan dikarenakan dampak perubahan iklim elnino yang dialami oleh Provinsi Sumatera Selatan mengakibatkan buah nanas yang dihasilkan kurang maksimal sehingga mempengaruhi hasil produksi yang didapat. Pada umumnya tanaman nanas ditanam sebagai tanaman sela di antara tanaman karet sehingga saat ini produksi nanas mengalami penurunan seiring dengan usia tanaman karet yang mulai produksi.

e. Capaian Kinerja Produksi Tanaman Obat/Biofarmaka Tahun 2023

Capaian kinerja produksi tanaman obat/biofarmaka tahun 2023 sebesar 6.358 ton dari target sebesar 3.122 ton, sehingga pencapaian produksi adalah 203,65 % dari target yang ditentukan. sebagaimana disajikan pada tabel II.16 berikut:

Tabel II.16. Target dan Realisasi Produksi dan Produktivitas Tanaman Obat/Biofarmaka Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		Capaian Tahun 2023 (%)
			Target	Realisasi	
1.	Produksi Tanaman Obat	Ton	3.122	6.358	203,65

Produksi tanaman obat mengalami peningkatan di Tahun 2023 bila dibandingkan dengan Tahun 2022, hal ini disebabkan karena di Tahun 2023 adanya dukungan dari

Pemerintah Daerah berupa Gerakan Pengembangan Tanaman Obat Rempah-rempah dan Umbi-umbian.

Tabel II.17. Realisasi Produksi Tanaman Obat/Biofarmaka Tahun 2022 dan Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		Selisih
			2022	2023	
1.	Produksi Tanaman Obat	Ton	4.895	6.358	1.463

Berdasarkan Tabel II.17, produksi tanaman obat pada tahun 2022 sebesar 4.895 ton dan pada tahun 2023 sebesar 6.358 ton, yang berarti terjadi peningkatan jumlah produksi tanaman obat/ biofarmaka dari tahun 2022 ke tahun 2023 sebesar 1.463 ton atau 29,89 %. Produksi Tanaman Obat tahun 2023 sudah melampaui target produksi tahun 2023 berdasarkan Renstra. Keberhasilan ini tidak lepas dari Dukungan Program/ Kegiatan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan dibantu swadaya petani Tanaman Obat. Meskipun capaian ini sudah melampaui target, pemerintah khususnya Dinas Pertanian TPH Provinsi Sumatera Selatan tetap melakukan pembinaan dan memberikan dukungan program/kegiatan di tahun-tahun mendatang baik melalui Dana APBD maupun APBN.

f. Capaian Kinerja Produksi dan Produktivitas Cabai Tahun 2023

Capaian kinerja produksi cabai tahun 2022 sebesar 25.497 ton dari target sebesar 23.419 ton, sehingga pencapaian produksi adalah 108,87 % dari target yang ditentukan. Capaian kinerja produktivitas cabai tahun 2022 sebesar 57 Ku/Ha dari target sebesar 50,40 Ku/Ha sehingga pencapaian produktivitasnya

113,10 % dari target yang ditentukan, sebagaimana disajikan pada tabel II.18 berikut:

Tabel II.18. Target dan Realisasi Produksi dan Produktivitas Cabai Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		Capaian Tahun 2023 (%)
			Target	Realisasi	
1.	Produksi Cabai	Ton	24.303	15.270	62,83
2.	Produktivitas Cabai	Ku/Ha	50,79	4,59	9,04

Capaian kinerja produksi dan produktivitas cabe besar pada tahun 2023 lebih kecil dari target tahun 2022. Tidak tercapainya target produksi dan produktivitas dikarenakan berkurangnya jumlah petani yang menanam cabai yang disebabkan kekurangan modal sehingga Sebagian petani beralih melakukan budidaya tanaman lainnya. Selain itu juga di tahun 2023 komoditas cabai banyak yang terserang penyakit busuk buah sehingga jumlah produksi berkurang dibandingkan dengan tahun 2022.

Tabel II.19. Realisasi Produksi dan Produktivitas Cabai Tahun 2022 dan Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		Selisih
			2022	2023	
1.	Produksi Cabai	Ton	25.497	15.270	(10.227)
2.	Produktivitas Cabai	Ku/Ha	5,68	4,59	(1,09)

Berdasarkan Tabel II.19, produksi cabai pada tahun 2022 sebesar 25.497 ton dan pada tahun 2023 sebesar 15.270 ton, yang berarti terjadi penurunan jumlah produksi cabai dari tahun 2022 ke tahun 2023 sebesar 10.227 ton atau 40,11 %. Produktivitas cabai pada tahun 2022 sebesar 5,68 Ku/Ha dan

pada tahun 2023 sebesar 4,59 Ku/Ha, yang berarti produktivitas cabai dari tahun 2022 ke tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 1,09 Ku/Ha atau 19,19 %.

Produksi dan produktivitas cabe besar tahun 2023 mengalami penurunan pada wilayah sentra cabai seperti Kabupaten Muara Enim, Kabupaten OKI, Kabupaten OKU Selatan dan Kabupaten Musi Rawas. Penurunan ini disebabkan karena faktor cuaca dan iklim serta sebagian besar daerah di Sumatera Selatan terdampak elnino (kekeringan) sehingga petani tidak bisa menanam cabai, dan pada bulan November-Desember di beberapa wilayah sentra cabai mengalami bencana kebanjiran sehingga menyebabkan kerusakan pada tanaman cabai.

g. Capaian Kinerja Produksi dan Produktivitas Bawang Merah Tahun 2023

Capaian kinerja produksi bawang merah tahun 2023 sebesar 1.197 ton dari target sebesar 710 ton, sehingga pencapaian produksi adalah 168,59 % dari target yang ditentukan. Capaian kinerja produktivitas bawang merah tahun 2023 sebesar 7,28 Ku/Ha dari target sebesar 56,44 Ku/Ha sehingga pencapaian produktivitasnya 12,90 % dari target yang ditentukan, sebagaimana disajikan pada tabel II.20 berikut:

Tabel II.20. Target dan Realisasi Produksi dan Produktivitas Bawang Merah Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		Capaian Tahun 2023 (%)
			Target	Realisasi	
1.	Produksi Bawang Merah	Ton	710	1.197	168,59
2.	Produktivitas Bawang Merah	Ku/Ha	56,44	7,28	12,90

Capaian produksi bawang merah tahun 2023 telah melampaui target produksi tahun 2023 berdasarkan Renstra. Peningkatan produksi ini dikarenakan adanya bantuan paket lengkap salah satunya adalah pemberian bantuan varietas unggul berlabel, serta pemupukan sesuai anjuran. Bantuan kegiatan APBN untuk pengembangan kawasan bawang merah di kabupaten Musi Rawas seluas 10 Ha dan Kabupaten OKU Timur seluas 10 Ha serta bantuan kegiatan APBD Provinsi yang dialokasikan untuk pengembangan hortikultura di Kabupaten Ogan Ilir seluas 2 Ha. Selain itu peningkatan produksi juga terjadi karena meningkatnya minat petani untuk menanam tanaman bawang merah setelah melihat keberhasilan petani dalam membudidayakan tanaman ini.

Upaya yang akan terus dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan yaitu dengan tetap menjalankan Program dan Kegiatan yang mendukung peningkatan produksi dan produktivitas hortikultura.

Tabel II.21. Realisasi Produksi dan Produktivitas Bawang Merah Tahun 2022 dan Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		Selisih
			2022	2023	
1.	Produksi Bawang Merah	Ton	1.130	1.197	67
2.	Produktivitas Bawang Merah	Ku/Ha	6,28	7,28	1

Berdasarkan Tabel II.21, capaian produksi dan produktivitas bawang merah tahun 2022 terhadap tahun 2023 mengalami peningkatan. Adanya peningkatan produksi selain karena adanya dukungan bantuan pemerintah baik dari APBN maupun APBD, juga adanya carry over pertanaman di tahun

2021. Produktivitas juga mengalami peningkatan karena petani sudah lebih paham dalam pengolahan lahan mulai dari pemberian pupuk yang sesuai dosis dengan jarak tanam 15 cm x 15 cm sehingga hasil produksi sangat baik.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Keberhasilan suatu perencanaan dapat dilihat dengan sinergi antara perencanaan pembangunan nasional yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan Perencanaan Pembangunan Daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi. Meskipun sejumlah kebijakan yang bersifat pengaturan telah dibuat untuk mensinergikan perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah provinsi antara lain oleh kebijakan perencanaan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang dikenal sebagai proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Meskipun sistem Musrenbang telah dikembangkan lebih baik, dalam rangka menerpadukan perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah provinsi masih belum optimal. Melihat kondisi tersebut di atas maka Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan berupaya untuk mensinergikan proses perencanaan baik tingkat pusat dan provinsi dalam rangka:

1. Mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan.
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah.
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat.
5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan dan Hortikultura. Adapun tujuannya, antara lain:

1. Meningkatkan ketersediaan produksi tanaman pangan berkelanjutan.
2. Meningkatkan ketersediaan produksi hortikultura berkelanjutan.

Sedangkan sasaran jangka menengah Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, antara lain:

1. Meningkatnya produksi dan produktivitas tanaman pangan strategis.
2. Meningkatnya produksi dan produktivitas hortikultura.

Rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan dalam lima tahun mendatang, yaitu:

VISI : MEMBANGUN SUMSEL MENJADI LEBIH MAJU			
MISI I : Membangun Sumsel berbasis ekonomi kerakyatan, didukung sektor pertanian, industri, dan UMKM yang tangguh untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan baik di perkotaan maupun di perdesaan.			
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Kebijakan**
Meningkatkan Perekonomian Sektor Unggulan	Meningkatnya Produksi Sektor Unggulan Pertanian	1. Meningkatkan akses petani terhadap saprodi berkualitas dan terjangkau melalui Pengembangan sistem Perbenihan, Pengawasan Peredaran dan Kelancaran Distribusi Pupuk dan Pestisida 2. Menjamin ketersediaan air di lahan irigasi dan non irigasi melalui peningkatan pembangunan/rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi tersier dan peningkatan ketersediaan air permukaan (embung) 3. Meningkatkan luas tanam untuk meningkatkan produksi padi dalam rangka meningkatkan Sumsel Lumbung Pangan melalui peningkatan perluasan areal tanam dan peningkatan intensitas pertanaman 4. Mengoptimalkan peran penyuluh pertanian dalam upaya peningkatan kapasitas kelembagaan dan ketenagaan penyuluhan pertanian 5. Meningkatkan kemampuan petani dalam penanganan pasca panen, pengolahan hasil, pemasaran dan kemitraan.	1. Meningkatkan Ketersediaan Benih Unggul, Pupuk dan Pestisida di tingkat Petani 2. Meningkatkan kelancaran distribusi sarana produksi, dan produksi pertanian dari dan keluar sentra produksi komoditi tanaman pangan dan hortikultura 3. Meningkatkan luas layanan air irigasi dan non irigasi untuk perluasan lahan siap tanam 4. Meningkatkan Produksi tanaman pangan dan hortikultura yang berkelanjutan 5. Menguatkan kelembagaan petani dan kelembagaan ekonomi petani berbasis kawasan pertanian 6. Meningkatkan produk unggulan tanaman pangan dan hortikultura

Tujuan Strategis dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan bidang Penyelenggaraan Akuntabilitas adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan produktivitas tanaman pangan dengan penerapan teknologi spesifik lokasi;
2. Meningkatkan luas panen dengan penerapan teknologi spesifik lokasi;
3. Meningkatkan luas tanam tanaman hortikultura unggulan pada kawasan;
4. Meningkatkan produktivitas;
5. Meningkatkan mutu pengolahan hasil;
6. Memperluas pemasaran hasil tanaman pangan dan hortikultura.

Dengan memperhatikan visi, misi yang terdapat pada RPJMD serta mengidentifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan maka hasil telaah ditetapkan tujuan dan sasaran. Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut terdapat beberapa indikator yang mengukurnya. Target dari indikator sasaran tersebut mengalami perubahan di Tahun 2022 dan 2023.

Rencana strategis Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 menargetkan kondisi ideal yang ingin dicapai dalam pembangunan pertanian untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga petani dalam rangka peningkatan kesejateraan masyarakat Provinsi Sumatera Selatan secara keseluruhan dengan mengusahakan peningkatan pendapatan per kapita penduduk di sektor pertanian melalui strategi dan program-program pembangunan pertanian.

Tingkat capaian kinerja pelayanan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura pada RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 berdasarkan persentase sasaran/target Renstra Dinas dan realisasi

terdapat beberapa indikator sasaran yang belum tercapai dan ada juga melebihi target. Adapun rinciannya sebagai berikut:

I. Indikator sasaran yang belum tercapai:

a. Realisasi produksi padi pada tahun 2023 lebih kecil 71,84% dari target.
b. Realisasi produksi jagung pada tahun 2023 lebih kecil 85,83% dari target.
c. Realisasi produksi kedelai pada tahun 2023 lebih kecil 1,68% dari target.
d. Realisasi produksi jeruk pada tahun 2023 lebih kecil 80,27% dari target.
e. Realisasi produksi duku pada tahun 2023 lebih kecil 69,27% dari target.
f. Realisasi produksi cabai pada tahun 2023 lebih kecil 62,83% dari target.
g. Realisasi produktivitas jagung pada tahun 2023 lebih kecil 95,78% dari target.
h. Realisasi produktivitas jeruk pada tahun 2023 lebih kecil 7,01% dari target.
i. Realisasi produktivitas durian pada tahun 2023 lebih kecil 14,32% dari target.
j. Realisasi produktivitas duku pada tahun 2023 lebih kecil 94,54% dari target.
k. Realisasi produktivitas nanas pada tahun 2023 lebih kecil 62,70% dari target.
l. Realisasi produktivitas cabai pada tahun 2023 lebih kecil 9,04% dari target.
m. Realisasi produktivitas bawang merah pada tahun 2023 lebih kecil 12,90% dari target.

II. Indikator sasaran yang melebihi target:

a. Realisasi produksi durian pada tahun 2023 lebih besar 130,52% dari target.
b. Realisasi produksi nanas pada tahun 2023 lebih besar 244,93% dari target.
c. Realisasi produksi tanaman obat pada tahun 2023 lebih besar 203,65% dari target.
d. Realisasi produksi bawang merah pada tahun 2023 lebih besar 168,59% dari target.
e. Realisasi produktivitas padi pada tahun 2023 lebih besar 110,7% dari target.
f. Realisasi produktivitas kedelai pada tahun 2023 lebih besar 118,34% dari target.
g. Realisasi produktivitas jeruk siam pada tahun 2022 lebih besar 3,04% dari target.

Untuk mencapai Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2025 akan melaksanakan program-program sebagai berikut:

1. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian;
2. Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan;
3. Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Hortikultura;
4. Program Pengelolaan Sistem Penyediaan Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura;
5. Program Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura;
6. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian;
7. Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Pemasaran dan Industri Hasil Pertanian;

8. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian;
9. Program Penyuluh Pertanian.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Sektor pertanian memiliki peranan yang sangat penting dalam perekonomian, yaitu berfungsi sebagai basis atau landasan pembangunan ekonomi. Sektor ini memiliki kontribusi yang besar dalam pembentukan PDRB Sumatera Selatan. Sektor ini termasuk ke dalam tiga sektor terbesar yang menyokong PDRB setelah sektor pertambangan dan energi, serta sektor industri pengolahan. Peranan sektor pertanian bukan saja terhadap ketahanan pangan, tetapi juga memberikan andil yang cukup besar terhadap kesempatan kerja karena merupakan sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja.

Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan merupakan salah satu Pelayanan di bidang Pembangunan Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura di Sumatera Selatan perlu didasarkan pada peningkatan keterampilan dan keahlian petani, pengembangan sistem data dasar dan informasi yang akurat dan lengkap, penyediaan prasarana dan sarana produksi, peningkatan kerjasama dan kemitraan dengan swasta, penguatan koordinasi dan konsultasi dengan para pemangku kepentingan, serta pelaksanaan pengendalian dan evaluasi yang teratur dan terpadu.

Dalam penyusunan Renja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan, perlu dilakukan analisa terhadap kondisi objektif pertanian. Meskipun memiliki potensi yang besar, pembangunan pertanian di Provinsi Sumatera Selatan masih menghadapi berbagai tantangan berkenaan dengan penerapan teknologi, kondisi sumber daya alam, prasarana dan sarana produksi, sumber daya manusia dan kelembagaan. Dalam pengembangan pelayanan Dinas Pertanian terdapat berbagai strategi dan sasaran yang harus dihadapi yaitu skala

usaha kecil, benih bermutu belum cukup tersedia, ancaman organisme pengganggu tanaman dan dampak perubahan iklim, penurunan mutu dan kehilangan hasil, keterbatasan pengetahuan petani dan jejaring kerja, kontinuitas pasokan tergantung musim panen, gejolak/fluktuasi harga, disparitas harga produk di tingkat petani dan konsumen, dan hambatan distribusi produk.

Pelaksanaan tugas, fungsi dan peran Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan tidak terlepas dari dinamika lingkungan strategis baik regional, nasional maupun global, yang ditelaah melalui pendekatan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas fungsi pelayanan Perangkat Daerah, telaah visi - misi - sasaran program Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih; telaah Renstra Kementerian dan Telaah RTRW, sehingga dapat ditentukan isu-isu strategis sebagai berikut:

1. Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan

Hampir setiap tahun Indonesia selalu disibukkan dengan masalah kabut asap. Walaupun nyaris telah menjadi masalah rutin, namun kabut asap hingga saat ini tetap merupakan masalah yang rumit dan sulit diatasi, serta berdampak pada berbagai aspek kehidupan, mulai dari kesehatan, transportasi, perdagangan, maupun hubungan internasional, khususnya hubungan bilateral dengan negara-negara tetangga yang terpapar kabut asap.

Masalah kabut asap yang melintasi batas negara (transboundary haze pollution) di Indonesia disebabkan oleh kebakaran lahan gambut di wilayah yang berbatasan dengan negara-negara tetangga. Mengingat tingginya persentase kebijakan kebakaran di luar kawasan hutan yang disebabkan oleh penyiapan lahan untuk perkebunan dan pertanian, maka sektor pertanian (seharusnya) dapat memainkan peranan yang lebih besar dalam meminimalkan kejadian kebakaran lahan gambut dan kabut asap.

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah lama mengantisipasi Kebakaran Hutan dan Lahan dengan menerbitkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Prosedur Tetap Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, dengan maksud untuk memberikan pedoman atau acuan bagi Tim Terpadu, SKPD dan Unit Pengendalian Kebakaran dalam melakukan sosialisasi, patroli, waktu siaga dan pengawasan terhadap pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Sumatera Selatan sehingga dapat dilaksanakan secara terencana, terkoordinasi, terpadu dan terkendali. Peraturan Gubernur tersebut juga bertujuan untuk mendorong dan meningkatkan kesadaran, kemauan dan peran serta masyarakat dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan dengan menggunakan metode pendekatan baik secara perorangan, kelompok maupun pendekatan secara massal.

Pelibatan masyarakat sebagai Tim Pengendali kebakaran merupakan hal yang mutlak karena keberadaan mereka yang dekat dengan lokasi kebakaran (jika api berada di wilayah desa, tentunya penduduk setempat akan berusaha untuk memadamkan karena api dapat mengganggu kebun, lahan ataupun tempat tinggal mereka) sehingga memang diperlukan pengintegrasian ataupun keterlibatan pemerintah desa dan masyarakat desa agar dapat terlibat dalam sistem pengendalian KarHutLah.

2. Pengawalan Petugas dalam Peningkatan Ekonomi Pertanian

Sistem Informasi Penyuluhan Pertanian (SIMLUHTAN) merupakan suatu suatu sistem yang mencakup seluruh data pertanian yang ada. Sistem Informasi Ketenagaan dan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian merupakan Sistem Informasi Manajemen yang dibangun untuk meningkatkan kinerja manajemen Pusat Penyuluhan Pertanian. Melalui pendanaan APBN Tahun 2023 telah dilaksanakan kegiatan Verifikasi dan Validasi data SIMLUHTAN pada tanggal 31 Oktober -

1 November 2023, tujuan kegiatan ini adalah untuk melaksanakan koordinasi kepada para 17 kabupaten/kota tentang pentingnya validasi dan verifikasi data yang terdapat dalam SIMLUHTAN. Diharapkan pada tahun 2024 data SIMLUHTAN untuk Provinsi Sumatera Selatan sudah rampung diperbaiki dan dapat digunakan oleh berbagai *stakeholder* pengguna data pertanian tersebut.

Peningkatan Kapasitas Penyuluh merupakan kegiatan sertifikasi yang dilakukan terhadap 195 tenaga PPEP dari 17 Kabupaten/ Kota dan Provinsi Sumatera Selatan. Kegiatan ini telah dilaksanakan dalam 2 angkatan yaitu pada tanggal 2-4 Oktober 2023 (sebanyak 75 peserta) dan 8-10 November 2023 (sebanyak 120 peserta). Kegiatan Peningkatan Kapasitas Penyuluh melalui Sertifikasi Kompetensi Penyuluh Pertanian Provinsi Sumatera Selatan bertujuan meningkatan kapasitas dan profesionalisme penyuluh pertanian, serta menambah jumlah penyuluh pertanian yang sertifikat. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat terwujud penyuluh pertanian yang professional di 17 Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan.

Sedangkan Penyuluh pertanian PNS yang ada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan berjumah 21 (dua puluh satu) orang. Berdasarkan jabatannya penyuluh pertanian Provinsi Sumatera Selatan terdiri dari 4 (empat) orang Penyuluh Pertanian Madya; 9 (sembilan) orang Penyuluh Pertanian Muda; 7 (tujuh) orang Penyuluh Pertanian Pertama; dan 1 (satu) orang Penyuluh Pertanian Pelaksana Lanjutan. Dimana setiap penyuluh ditugaskan untuk membina satu kabupaten/kota sebagai wilayah binaan. Pada kedudukannya penyuluh pertanian provinsi merupakan pejabat fungsional, namun demikian dalam penugasannya lebih banyak ditugaskan untuk membantu administrasi kegiatan dibidang tempat para penyuluh diperbantukan.

3. Update Luas Lahan Baku Sawah (LBS)

Kegiatan ini telah dilaksanakan sejak tahun 2023 di 17 (tujuh belas) kabupaten/kota. Namun data update tersebut baru ditetapkan pada tahun 2024 berdasarkan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 446.1/SK-PG.03.03/V/2024 tentang Penetapan Luas Lahan Baku Sawah Nasional Tahun 2024 tanggal 31 Mei 2024. Luas lahan baku sawah (LBS) Sumatera Selatan adalah 519.484 Ha yang terbagi menjadi lahan sawah irigasi seluas 216.118 Ha (41,60 %) dan lahan sawah non irigasi seluas 303.366 Ha (58,40%), penambahan LBS seluas 48.882 Ha (10,39 %). Namun, jika dirinci per kabupaten/kota terdapat penambahan maupun pengurangan area. Penetapan ini masih terdapat kekurangan diantaranya belum adanya SK lanjutan terhadap luasan per kabupaten, namun demikian luasan secara spasial telah disampaikan sebagai data pendukung terhadap SK tersebut. Data LBS Sumatera Selatan disajikan pada Tabel di bawah ini :

No.	Kabupaten/Kota	LAHAN BAKU SAWAH (Ha)								ATR/BPN LBS 2024 *
		SP LAHAN 2017	ATR/BPN (BIG) 2018	ATR/BPN 2019	REVIU			Jumlah (a+b+c)	LBS 2019 + Hasil Reviu 2020 - 2022	
					2020	2021	2022			
					a	b	c	d		
1	Banyuasin	192.684,00	152.794,00	174.370,86	11.799,02	20.989,45	10.456,16	43.244,63	217.615,49	189.345
2	Empat Lawang	13.554,00	8.312,55	9.339,68	3.990,11	154,67	193,88	4.338,66	13.678,34	9.432
3	Lubuk Linggau	1.916,00	1.287,00	1.086,74	249,03	87,77	8,90	345,69	1.432,44	1.129
4	Pagar Alam	3.340,30	3.631,00	2.946,52	316,84	156,30	4,56	477,70	3.424,22	3.088
5	Palembang	5.938,00	3.303,00	3.409,15	11,11	263,96	193,41	468,49	3.877,64	3.295
6	Prabumulih	450,00	31,00	279,89	27,07	23,33	-	50,40	330,29	165
7	Lahat	19.210,50	19.210,50	12.521,07	125,64	131,95	52,58	310,17	12.831,24	12.652
8	Muara Enim	21.402,40	9.739,11	13.905,82	7.225,52	667,40	293,80	8.186,72	22.092,55	19.527
9	Musi Banyuasin	51.228,00	26.194,00	34.646,42	2.908,43	3.260,00	119,11	6.287,54	40.933,97	38.051
10	Musi Rawas	23.411,00	11.145,00	13.327,88	6.880,95	1.579,07	56,94	8.516,96	21.844,84	14.969
11	Musi Rawas Utara	6.974,00	1.596,00	2.259,77	722,89	309,58	136,48	1.168,96	3.428,73	2.201
12	Ogan Ilir	49.631,00	28.540,00	30.934,54	5.464,61	9.886,40	1.135,20	16.486,21	47.420,75	34.787
13	Ogan Komering Ilir	123.192,00	53.792,84	97.345,59	18.063,78	7.948,79	452,79	26.465,37	123.810,96	105.436
14	Ogan Komering Ulu	5.739,00	1.734,72	3.837,05	-	1.071,26	260,47	1.331,73	5.168,78	3.561
15	Ogan Komering Ulu Selatan	17.954,00	6.768,00	7.178,02	4.036,65	615,64	40,57	4.692,87	11.870,88	8.821
16	Ogan Komering Ulu Timur	77.315,00	56.996,00	59.522,13	5.932,11	6.298,73	2.168,57	14.399,41	73.921,54	66.624
17	Penukal Abab Lematang Ilir	7.964,00	2.857,00	3.691,22	1.321,51	823,36	67,48	2.212,35	5.903,57	6.399
Grand Total		621.903,20	387.931,72	470.602,37	69.075,29	54.267,68	15.640,90	138.983,86	609.586,23	519.484,00

4. Potensi Lahan Baku Sawah

Data LBS jika disandingkan dengan data SP Lahan tahun 2017, Lahan Sawah Disepakati tahun 2024, dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Provinsi Sumatera Selatan disajikan dalam Tabel di bawah ini :

No.	Kabupaten/Kota	SP LAHAN 2017 *	LBS 2019	DSU 2023 (LBS 2023)	LSD 2024	LP2B
1	Banyuasin	192.684,00	174.370,86	189.345,19	187.986,89	104.973,00
2	Empat Lawang	13.554,00	9.339,68	9.431,90	9.431,89	11.562,00
3	Lubuk Linggau	1.916,00	1.086,74	1.129,32	1.128,74	857,19
4	Pagar Alam	3.340,30	2.946,52	3.088,13	3.086,43	1.392,66
5	Palembang	5.938,00	3.409,15	3.294,74	3.204,22	
6	Prabumulih	450,00	279,89	165,48	165,48	94,71
7	Lahat	19.210,50	12.521,07	12.652,42	12.648,53	
8	Muara Enim	21.402,40	13.905,82	19.527,10	19.361,37	16.512,54
9	Musi Banyuasin	51.228,00	34.646,42	38.050,92	38.006,60	33.809,66
10	Musi Rawas	23.411,00	13.327,88	14.968,66	14.962,72	21.635,92
11	Musi Rawas Utara	6.974,00	2.259,77	2.201,09	2.201,09	3.292,29
12	Ogan Ilir	49.631,00	30.934,54	34.787,31	34.739,58	30.934,55
13	Ogan Komering Ilir	123.192,00	97.345,59	105.435,90	104.432,45	75.424,28
14	Ogan Komering Ulu	5.739,00	3.837,05	3.561,11	3.556,62	
15	Ogan Komering Ulu Selatan	17.954,00	7.178,02	8.821,42	8.814,02	6.521,00
16	Ogan Komering Ulu Timur	77.315,00	59.522,13	66.623,94	66.422,41	52.285,84
17	Penukal Abab Lematang Ilir	7.964,00	3.691,22	6.399,31	6.327,51	
Grand Total		621.903,20	470.602,37	519.483,94	516.476,55	359.295,64

Keterangan:
LSD = Lahan sawah disepakati
DSU = Data sawah update
LP2B = Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

5. Alih Fungsi Lahan

Salah satu permasalahan yang cukup serius terkait dengan keberadaan lahan sawah adalah makin maraknya alih fungsi lahan sawah ke penggunaan lainnya terutama lahan sawah tadah hujan. Total luas penggunaan lahan sawah di Provinsi Sumatera Selatan tercatat 739.395 Ha. Pada rentang waktu Tahun 2013 – 2017 telah terjadi penurunan luas baku lahan sawah sebesar 5,32 % (41.533 Ha) sedangkan pada rentang waktu tersebut sebenarnya alih fungsi lahan sawah yang terjadi adalah seluas 66.091 Ha dan terdapat cetak sawah baru dari tahun 2016 – 2018 seluas 22.365 Ha tetapi cetak sawah tersebut bukan merupakan penggantian terhadap alih fungsi lahan yang terjadi, tetapi merupakan program pemerintah untuk meningkatkan luas baku lahan sawah.

6. Kemiskinan

Pada kurun waktu Maret 2021-Maret 2022 angka kemiskinan Sumatera Selatan turun sebesar 0,94 persen poin dari 12,84 persen menjadi 11,90 persen. Sedangkan jumlah penduduk miskinnya turun sebanyak 69,07 ribu orang dari 1.113,76 ribu orang menjadi 1.044,69 ribu orang. Dibandingkan September 2021, angka kemiskinan Maret 2022 Sumatera Selatan juga turun sebesar 0,89 persen poin dari 12,79 persen menjadi 11,90 persen. Sedangkan jumlah penduduk miskinnya turun sebanyak 71,92 ribu orang dari 1.116,61 ribu orang menjadi 1.044,69 ribu orang. Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada Maret 2021 sebesar 12,36 persen turun menjadi 11,99 persen pada September 2021 dan turun menjadi 11,23 persen pada Maret 2022. Sementara persentase penduduk miskin di daerah perdesaan naik dari 13,12 persen pada Maret 2021 menjadi 13,28 persen pada September 2021 dan turun menjadi 12,31 persen pada Maret 2022.

Permasalahan kemiskinan di perdesaan yang umumnya bekerja di sektor pertanian mengindikasikan rendahnya produktivitas yang dihasilkan dari lapangan usaha sektor pertanian, yang disebabkan oleh rendahnya kepemilikan lahan, kurangnya pengetahuan dan keterampilan serta kurangnya modal usaha tani.

Strategi Sektor Pertanian dalam Upaya Penurunan Angka Kemiskinan dengan cara Peningkatan Produksi dan Produktivitas Komoditi Hortikultura melalui dukungan Program dan Kegiatan dan Gerakan Sumsel Mandiri Pangan. Konsep Gerakan Sumsel Mandiri Pangan yaitu kondisi masyarakat yang mempunyai kemampuan untuk mewujudkan ketahanan pangan dan gizi keluarga melalui pengembangan ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan dengan memanfaatkan sumber daya setempat secara berkelanjutan melalui perubahan pola fikir dari konsumen menjadi produsen (Herman Deru, 2021).

Dukungan program dan kegiatan Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP) dalam menurunkan angka kemiskinan mulai terlihat. Berita resmi statiskan hari Jumat 15 Juli 2022 menunjukkan tingkat kemisikinan Sumsel mengalami penurunan. Program GSMP dengan fokus bantuan pada rumah tangga miskin yang berada di persentil 12 keatas mulai mengubah mindset masyarakat semula hanya sebagai konsumen sekarang berperan juga sebagai produsen melalui pengembangan ketersediaan, distribusi dan konsumsi yang berkelanjutan.

7. Sarana prasarana pengembangan tanaman pangan dan hortikultura

a. Jaringan Irigasi

Salah satu prasarana yang saat ini keberadaannya belum optimal adalah jaringan irigasi, kurangnya pembangunan jaringan irigasi

yang baru serta rusaknya jaringan irigasi yang ada mengakibatkan daya dukung irigasi bagi pertanian sangat menurun. Kerusakan ini terutama disebabkan oleh banjir dan erosi, kerusakan sumber daya alam di daerah aliran sungai serta kurangnya pemeliharaan jaringan irigasi hingga ke tingkat usahatani. Tantangan yang dihadapi dalam prasarana perairan adalah bagaimana meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan jaringan irigasi pedesaan, pengembangan sumber-sumber air alternatif dan berskala kecil antara lain melalui pemanfaatan teknologi pengambilan air permukaan dan bawah tanah, pembangunan dan pemeliharaan embung serta pemanfaatan sumber air tanah.

b. Alat dan Mesin Pertanian

Sebagai salah satu unsur pendukung pertanian, pengembangan alsintan untuk usahatani memiliki peranan dan peluang yang besar dalam hubungannya dengan peningkatan dan diversifikasi produksi, peningkatan efisiensi dan pendapatan usaha tani serta pengembangan agribisnis. Tantangan kedepannya adalah bagaimana menumbuh kembangkan kelembagaan penyediaan jasa alat dan mesin pertanian sesuai dengan spesifik lokasi.

c. Pupuk

Pupuk merupakan komoditas yang seringkali menjadi langka pada saat dibutuhkan, terutama pupuk bersubsidi. Dengan keterbatasan penyediaan pupuk kimia, ternyata pengetahuan dan kesadaran petani untuk menggunakan dan mengembangkan pupuk organik sendiri sebagai pupuk alternatif sangat kurang. Tantangan untuk mengembangkan sarana produksi pertanian kedepan adalah mendorong petani memproduksi dan meningkatkan pemakaian pupuk organik, serta mendorong petani untuk menggunakan pestisida dan obat-obatan tanaman yang ramah lingkungan.

8. Kelembagaan Petani dan Penyuluh

Sistem Informasi Penyuluhan Pertanian (SIMLUHTAN) merupakan suatu suatu sistem yang mencakup seluruh data pertanian yang ada. Sistem Informasi Ketenagaan dan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian merupakan Sistem Informasi Manajemen yang dibangun untuk meningkatkan kinerja manajemen Pusat Penyuluhan Pertanian.

Melalui pendanaan APBN Tahun 2023 telah dilaksanakan kegiatan Verifikasi dan Validasi data SIMLUHTAN pada tanggal 31 Oktober - 1 November 2023, tujuan kegiatan ini adalah untuk melaksanakan koordinasi kepada para 17 kabupaten/kota tentang pentingnya validasi dan verifikasi data yang terdapat dalam SIMLUHTAN. Diharapkan pada tahun 2024 data SIMLUHTAN untuk Provinsi Sumatera Selatan sudah rampung diperbaiki dan dapat digunakan oleh berbagai *stakeholder* pengguna data pertanian tersebut.

Kelembagaan penyuluhan pertanian yang berupa Balai Penyuluh Pertanian (BPP) berjumlah 197 BPP. Jumlah Kecamatan yang ada di Provinsi Sumatera Selatan sebanyak 241 Kecamatan. Jumlah Desa yang ada di Provinsi Sumatera Selatan sebanyak 3.253 Desa. Jumlah petani yang ada di Provinsi Sumatera Selatan 804.990 orang yang tergabung dalam kelompok tani. Jumlah penyuluh pertanian di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 terdiri dari 898 orang penyuluh PNS, 573 orang penyuluh PPPK, 40 orang penyuluh THL- TBPP APBN, sebanyak 1.074 orang penyuluh THL-TBPP APBD Provinsi dan 381 orang penyuluh THL-TBPP APBD Kab/Kota. Sehingga jumlah total penyuluh pertanian yang tersebar di 17 kabupaten/kota yaitu 2.868 orang. Keragaan jumlah penyuluh pertanian di Provinsi Sumatera Selatan dan 17 Kabupaten/Kota disajikan pada Tabel di bawah ini:

Keragaan Penyuluh Pertanian Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024

No	KABUPATEN	TENAGA PENYULUH PERTANIAN						
		PNS	PPPK	CPNS	THL BPP	THL KAB/KOTA	PPEP	TOTAL
1	Provinsi Sumsel	21	32	-	-	-	80	133
2	Banyuasin	111	52	-		-	150	313
3	Empat Lawang	25	20	-		-	25	70
4	Kota Lubuklinggau	44		-	5	-	11	60
5	Kota Pagar Alam	37	4	-	1	-	20	62
6	Kota Palembang	33	6	-		-	31	70
7	Kota Prabumulih	23	12	-		-	3	38
8	Lahat	71	43	-	31	1	71	217
9	Muara Enim	83	42	1		1	46	173
10	Musi Banyuasin	74	24	-		6	26	130
11	Musi Rawas	74	39	-	1	98	25	237
12	Musi Rawas Utara	3	5	-		80	12	100
13	Ogan Ilir	71	43	-	1	71	17	203
14	Ogan Komering Ilir	60	57	-		124	117	358
15	Ogan Komering Ulu	47	12	1		-	92	152
16	Ogan Komering Ulu Selatan	48	25	-	1	-	112	186
17	Ogan Komering Ulu Timur	49	32	-		-	223	304
18	Penukal Abab Lematang Ilir	24	25	-		-	13	62
TOTAL		**898**	**473**	**2**	**40**	**381**	**1.074**	**2.868**

Sumber: Data Simluhtan tanggal Oktober 2024

Penyuluh pertanian PNS yang ada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan berjumah 21 (dua puluh satu) orang. Berdasarkan jabatannya penyuluh pertanian Provinsi Sumatera Selatan terdiri dari 4 (empat) orang Penyuluh Pertanian Madya; 9 (sembilan) orang Penyuluh Pertanian Muda; 7 (tujuh) orang Penyuluh Pertanian Pertama; dan 1 (satu) orang Penyuluh Pertanian Pelaksana Lanjutan. Dimana setiap penyuluh ditugaskan untuk membina satu kabupaten/kota sebagai wilayah binaan. Pada kedudukannya penyuluh pertanian provinsi merupakan pejabat fungsional, namun demikian dalam penugasannya lebih banyak ditugaskan untuk membantu administrasi kegiatan dibidang tempat para penyuluh diperbantukan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja bisa berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan apabila ditunjang dengan produk dokumen perencanaan yang baik, dalam rangka mengawal program/kegiatan pembangunan yang dilaksanakan agar dapat berjalan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran. Dokumen perencanaan daerah diantaranya terdiri dari: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis SKPD, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Kerja SKPD dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Dokumen perencanaan sebagaimana disebutkan di atas khususnya Rencana Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024. Adapun rincian review terhadap rancangan awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2024 dengan Rencana Kerja Dinas Pertanian Tahun 2023 disajikan pada Tabel T-C. 31 sebagai berikut :

Tabel T-C.31
Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024
Provinsi Sumatera Selatan

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan

Nomor	Kode	Permendagri 90 Tahun 2019 (Kepmendagri 050-3708)	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024					
		Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)		Bertambah / (Berkurang)	Sumber Dana
						Semula	Menjadi		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*7*		*8*
	3.27.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah (%)**		**100**	**49.455.205.825**	**49.455.205.825**	-	
	3.27.01.1.01	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Laporan Kinerja Tahunan (dok)**		**6**	**2.325.000.000**	**2.325.000.000**		
	3.27.01.1.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah (dok)	Palembang	3	1.775.000.000	1.775.000.000		PAD
	3.27.01.1.01.07	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah (laporan)	17 kab/kota	3	550.000.000	550.000.000		PAD
	3.27.01.1.02	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)**		**100**	**41.363.838.000**	**41.378.203.000**	**14.365.000**	
	3.27.01.1.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN (org)	Palembang	325	38.144.698.000	38.144.698.000		DAU
	3.27.01.1.02.02	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN (dokumen)	Palembang 4 UPTD	5	3.219.140.000	3.233.505.000	14.365.000	PAD
	3.27.01.1.03	**Kegiatan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah**	**Persentase Layanan Kelancaran Administrasi Perkantoran (%)**		**100**	**175.000.000**	**175.000.000**		
	3.27.01.1.03.02	Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah SKPD (dok)	Palembang	1	75.000.000	75.000.000		PAD
	3.27.01.1.03.04	Sub Kegiatan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan hasil pembinaan, pengawasan dan pengendalian barang milik daerah (laporan)	17 kab/kota	1	100.000.000	100.000.000		PAD
	3.27.01.1.05	**Kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah**				**100.000.000**	**100.000.000**		
			Persentase Ketaatan terhadap aturan kepegawaian (%)		**100**				
			Persentase pegawai yang ditingkatkan kapasitasnya (%)		**100**				
	3.27.01.1.05.09	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (orang)	Palembang	10	100.000.000	100.000.000		PAD

Nomor	Kode	Permendagri 90 Tahun 2019 (Kepmendagri 050-3708)	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024					
		Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)		Bertambah / (Berkurang)	Sumber Dana
						Semula	Menjadi		
	3.27.01.1.06	**Kegiatan administrasi umum perangkat daerah**	**Persentase Layanan Kelancaran Administrasi Perkantoran (%)**		**100**	**3.316.367.825**	**3.302.002.825**	**(14.365.000)**	
	3.27.01.1.06.01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan (paket)	Palembang 4 UPTD	1	50.000.000	50.000.000		PAD
	3.27.01.1.06.02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (paket)	Palembang	1	670.927.825	670.927.825		PAD
	3.27.01.1.06.04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan (paket)	Palembang	2	200.000.000	200.000.000		PAD
	3.27.01.1.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan (paket)	Palembang		50.000.000	50.000.000		PAD
	3.27.01.1.06.06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan (dokumen)	Palembang	1	55.000.000	55.000.000		PAD
	3.27.01.1.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi (laporan)	17 kab/kota	2	1.290.440.000	1.276.075.000	(14.365.000)	PAD
	3.27.01.1.06.11	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SIPD	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD (dokumen)	Palembang	1	1.000.000.000	1.000.000.000		PAD
	3.27.01.1.08	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Layanan Kelancaran Administrasi Perkantoran (%)**		**100**	**965.000.000**	**965.000.000**		
	3.27.01.1.08.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat (laporan)	Palembang	1	5.000.000	5.000.000		PAD
	3.27.01.1.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, SDA, dan listrik yang disediakan (laporan)	Palembang 4 UPTD	1	960.000.000	960.000.000		PAD
	3.27.01.1.09	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Layanan Kelancaran Administrasi Perkantoran (%)**		**100**	**1.210.000.000**	**1.210.000.000**		PAD
	3.27.01.1.09.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya (unit)	Palembang 4 UPTD	253	900.000.000	900.000.000		PAD

Nomor	Kode	Permendagri 90 Tahun 2019 (Kepmendagri 050-3708) Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024					
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)		Bertambah / (Berkurang)	Sumber Dana
						Semula	Menjadi		
	3.27.01.1.09.06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (unit)	Palembang 4 UPTD	135	160.000.000	160.000.000		PAD
	3.27.01.1.09.09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (unit)	Martapura	2	150.000.000	150.000.000		PAD
	3.27.02	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**Luas Pengembangan Tanaman Pangan dan Hortikultura :**	**17 kab/kota**		**14.154.500.000**	**14.154.500.000**	-	**PAD**
			- Padi (Ha)		**10.000**				
			- Jagung (Ha)		**5.000**				
			- Cabe (Ha)		**6**				
			- Bawang Merah (Ha)		**6**				
			- Jeruk (Ha)		**20**				
			- Nanas (Ha)		**5**				
	3.27.02.1.01	**Kegiatan Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian**	**Jumlah Pengawasan Peredaran Sarana TPH yang difasilitasi (dok)**	**17 kab/kota**	**5**	**10.709.400.400**	**10.709.400.400**		**PAD**
	3.27.02.1.01.01	Sub Kegiatan Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran pupuk, pestisida, alsintan dan sarana pendukung pertanian (laporan)	17 kab/kota	4	10.709.400.400	10.709.400.400		PAD
	3.27.02.1.02	**Kegiatan Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman**	**Jumlah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan peredaran benih TPH yang difasilitasi (dok)**			**3.445.099.600**	**3.445.099.600**		
	3.27.02.1.02.01	Sub Kegiatan Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	Jumlah sertifikat benih (sertifikat)	17 kab/kota	16	500.000.000	500.000.000		
	3.27.02.1.02.05	Sub Kegiatan Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan dan Perkebunan	Jumlah pengawasan mutu, penyediaan dan peredaran benih/ bibit hortikultura (laporan)	17 kab/kota	3	2.945.099.600	2.945.099.600		PAD

Nomor	Kode	Permendagri 90 Tahun 2019 (Kepmendagri 050-3708) Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024					
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)		Bertambah / (Berkurang)	Sumber Dana
						Semula	Menjadi		
	3.27.03	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**Peningkatan Luas Lahan Siap Tanam :**			**2.600.000.000**	**2.600.000.000**	-	
			- Padi (Ha)		**100**				
	3.27.03.1.01	**Kegiatan Penataan Prasarana Pertanian**	**Jumlah Prasarana Pertanian TPH yang difasilitasi (unit)**		**4**	**2.600.000.000**	**2.600.000.000**		
	3.27.03.1.01.04	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	Jumlah koordinasi, sinkronisasi dan pengelolaan jaringan irigasi di tingkat usaha tani (dok)	BA	1	2.300.000.000	2.300.000.000		PAD
	3.27.03.1.01.10	Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Jumlah gedung UPTD Pertanian serta sarana pendukungnya yang dibangun, dipelihara dan direhabilitasi (unit)	3 UPTD lingkup Dinas Pertanian TPH	3	300.000.000	300.000.000		PAD
	3.27.05.	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	**Luas Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi :**			**700.000.000**	**700.000.000**	-	
			- Tanaman Pangan (Ha)	17 kab/kota	**520**				
			- Hortikultura (Ha)	17 kab/kota	**97**				
	3.27.05.1.01	**Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi**	**Jumlah Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian TPH yang difasilitasi (kali)**	17 kab/kota	**220**	**700.000.000**	**700.000.000**		PAD
	3.27.05.1.01.01	Sub Kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Jumlah luas serangan OPT tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan yang dikendalikan (ha)	17 kab/kota	2.500	500.000.000	500.000.000		PAD
	3.27.05.1.01.02	Sub Kegiatan Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani (ha)	17 kab/kota	400	200.000.000	200.000.000		
	3.27.07	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**				**34.700.000.000**	**34.700.000.000**	-	
			Jumlah kelembagaan penyuluh yang meningkat kapasitasnya (unit)	17 kab/kota	**34**				
			Jumlah Kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya (unit)	17 kab/kota	**1.400**				
			Jumlah kemitraan usaha tani (unit)	17 kab/kota	**20**				
	3.27.07.1.01	**Kegiatan Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian**	**Jumlah ketenagaan penyuluhan pertanian yang ditingkatkan kapasitasnya (orang)**		**45**	**250.000.000**	**250.000.000**		

Nomor	Kode	Permendagri 90 Tahun 2019 (Kepmendagri 050-3708)	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024					
		Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)		Bertambah / (Berkurang)	Sumber Dana
						Semula	Menjadi		
	3.27.07.1.01.04	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	Jumlah Penyuluh Pertanian ASN yang Telah Mengikuti Pengembangan Kompetensi melalui Pendidikan dan Pelatihan (org)	Balai Pelatihan Penyuluhan Pertanian (OKU Timur) dan Palembang	45	250.000.000	250.000.000		PAD
	3.27.07.1.02	**Kegiatan Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian**	**Jumlah penerapan penyuluhan pertanian yang difasilitasi (dok)**		**2**	**34.250.000.000**	**34.250.000.000**		
	3.27.07.1.02.01	Sub Kegiatan Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah Diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian (dokumen)	BP3 Martapura (OKU Timur)	1	250.000.000	250.000.000		PAD
	3.27.07.1.02.02	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah kelompok petani yang mendapat penyuluhan dan pemberdayaan (kelompok)	17 kab/kota	1.400	34.000.000.000	34.000.000.000		PAD
	3.27.07.1.03	**Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan**	**Jumlah kelembagaan ekonomi petani yang ditingkatkan kapasitasnya (lembaga)**		**20**	**200.000.000**	**200.000.000**		PAD
	3.27.07.1.03.01	Sub Kegiatan Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani	Jumlah korporasi petani yang dibentuk dan beroperasi (unit)	Palembang	20	200.000.000	200.000.000		PAD
Jumlah						**101.609.705.825**	**101.609.705.825**	-	

Palembang, Agustus 2023

Kepala Dinas,

Dr. Ir. H. Bambang Pramono, M.Si
Pembina Tingkat I / IV.b
NIP 196703151990031004

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam konteks perencanaan pembangunan, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada, memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan, melayani/memenuhi kebutuhan masyarakat. Disisi lain, dalam era globalisasi, Dinas Pertanian dituntut untuk siap dan sanggup membuat/menyusun suatu perencanaan yang baik, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Proses penyusunan Renja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun 2024 didasarkan kepada Renstra Perubahan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026 dengan tetap memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan di dalam Dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Ranwal RKPD) Tahun 2023, agar didalam pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan dalam RPJMD dan Renstra dapat disinkronkan.

Usulan Program dan kegiatan dari masyarakat dilaksanakan melalui identifikasi program dan kegiatan di 17 kabupaten/kota yang selanjutnya dibahas pada rapat teknis ditingkat provinsi yang dihadiri oleh Dinas Pertanian lingkup tanaman pangan dan BAPPEDA Kabupaten/Kota serta aspirasi masyarakat yang disampaikan melaui Anggota Dewan pada saat reses. Usulan masyarakat tersebut setelah dibahas pada rapat teknis dan pada Musrenbang Tingkat Provinsi dan Musrenbangnas maka bentuk kegiatan yang dilaksanakan berupa bantuan benih, pupuk dan pestisida, pengadaan sarana prasarana alat dan mesin pertanian.

Usulan masyarakat tersebut sebagian besar terkait dengan isu-isu penting penyelenggaraan Tupoksi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan yaitu yang berkaitan dengan pencapaian swasembada dan swasembada berkelanjutan komoditas

strategis (padi, jagung dan kedelai), serta komoditas pangan lainnya berupa tanaman buah-buahan dan sayur-sayuran.

Usulan masyarakat yang terkait Tupoksi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan secara program, kegiatan dan komponen kegiatan terdapat kesesuaian dengan Program dan Kegiatan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan baik bersumber dari pendanaan APBD maupun APBN.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional Terkait Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan

Pembangunan ekonomi pada sektor pertanian dimaksudkan untuk meningkatkan pendapatan petani dan memeratakan pembangunan pedesaan. Pertanian merupakan sektor unggulan pembangunan nasional hampir di setiap negara berkembang. Dengan demikian pembangunan pertanian merupakan bagian dari pembangunan ekonomi nasional secara integral. Pembangunan pertanian dapat diartikan sebagai proses yang ditujukan untuk selalu menambah produk pertanian untuk tiap konsumen sekaligus mempertinggi pendapatan dan produktivitas usaha petani dengan jalan menambah modal dan skill untuk memperbesar campur tangan manusia di dalam perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Penambahan produksi, pendapatan maupun produktivitas ini berlangsung terus, sebab apabila tidak, berarti pembangunan terhenti.

Sektor pertanian merupakan komponen ekonomi nasional yang sangat strategis dan penting, karena menghasilkan sebagian besar dari produk domestik bruto negara, memberikan sebagian besar pendapatan ekspor dan mempekerjakan jutaan orang. Sektor pertanian juga disebut sebagai tulang punggung dalam perekonomian, oleh karena itu negara memperioritaskan pertanian dan ketahanan pangan penduduk dalam situasi sosial sebagai suatu hal yang penting bagi pembangunan manusia.

Pertumbuhan pertanian di suatu daerah dipengaruhi oleh keunggulan daya saing, keistimewaan wilayah, dan potensi pertanian yang dimiliki oleh daerah tersebut. Keberadaan potensi pertanian daerah tersebut tidak ada artinya bagi pertumbuhan pertanian di daerah tersebut jika tidak ada upaya untuk memanfaatkan dan mengembangkan potensi pertanian secara optimal. Oleh karena itu, pemanfaatan dan pengembangan semua potensi pertanian yang memiliki potensial tinggi harus menjadi prioritas utama untuk digali dan dikembangkan dalam melaksanakan pertumbuhan ekonomi daerah secara utuh.

Pertanian mempunyai peranan penting dalam kehidupan manusia karena berfungsi sebagai penyedia pangan, pakan untuk ternak dan bioenergy. Peran Pertanian sangat strategis dalam mendukung perekonomian nasional, terutama mewujudkan ketahanan pangan, peningkatan daya saing, penyerapan tenaga kerja dan penanggulangan kemiskinan. Selain itu, mendorong pertumbuhan agroindustry di hilir dan memacu ekspor komoditas pertanian untuk meningkatkan devisa negara. Di sisi lain penyediaan kebutuhan pangan masyarakat merupakan tugas utama yang tidak ringan.

Pertanian dapat mengurangi kemiskinan dan kelaparan di berbagai negara berkembang. Kontribusi terhadap pengentasan kemiskinan terjadi secara langsung melalui efek pertumbuhan pertanian terhadap lapangan kerja pertanian dan profitabilitas, sedangkan secara tidak langsung ialah dengan meningkatnya hasil pertanian akan mendorong terciptanya lapangan kerja disektor non-pertanian sebagai respon terhadap permintaan domestik yang lebih tinggi. Oleh karena itu, harga pangan yang berpotensi lebih rendah meningkatkan daya beli konsumen miskin. Di negara berkembang biasanya memiliki bagian yang relative tinggi dalam struktur

lapangan pekerjaan dan menghasilkan persentase PDB yang tinggi dibandingkan dengan pertanian di negara maju.

Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mengusung Visi Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045. Visi itu akan diwujudkan dengan 8 misi yang disebut **Asta Cita** yang berisikan tentang pengokohan ideologi hingga demokrasi. Ada juga soal pemantapan sistem pertahanan negara dan mendorong kemandirian bangsa lewat swasembada pangan hingga ekonomi kreatif.

Prabowo-Gibran juga berjanji memperkuat pembangunan SDM, melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi demi negeri, meningkatkan lapangan kerja hingga soal reformasi politik, hukum dan birokrasi.

Berikut di bawah ini adalah **Asta Cita** Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Prabowo-Gibran :

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas;

5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba;
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur.

Pada **Asta Cita kedua**, yaitu memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. Untuk program pangan di antaranya dengan pengembangan program *food estate*, terutama untuk padi, jagung, singkong, dan kedelai, dan tebu. Ditargetkan minimal 4 juta ha tambahan luas panen tanaman pangan tercapai pada tahun 2029. Untuk energi, Indonesia berpeluang bisa menjadi raja energi hijau dunia melalui pengembangan produk *biodiesel* dan *bio-avtur* dari sawit, *bioethanol* dari tebu dan singkong, serta energi hijau lainnya dari angin, matahari, dan panas bumi. Pada tahun 2029 dengan sumber daya alam yang ada, sangat optimis program *biodiesel* B50 dan campuran *ethanol* E10 akan dapat tercapai. Kecukupan air akan dijamin melalui manajemen air yang baik sehingga tersedia pada saat kemarau dan tidak menyebabkan bencana saat musim hujan.

Guna mencapai swasembada pangan, dibutuhkan peningkatan produktivitas lahan pertanian melalui berbagai program intensifikasi dan ekstensifikasi lahan. Kedua program tersebut dilakukan di level desa,

kecamatan, kabupaten/kota, dan nasional secara lebih efektif, terintegrasi, dan berkelanjutan dengan komoditas padi, jagung, kedelai, singkong, tebu, sagu, dan sukun. Ditargetkan minimal tambahan 4 juta ha luas panen tanaman pangan tercapai pada tahun 2029.

Swasembada pangan ditentukan oleh tercapainya produksi dan produktivitas yang berkelanjutan dari komoditas pangan. Produksi dan produktivitas pangan akan sangat ditentukan oleh tersedianya dan akses yang menyeluruh petani pada pupuk, benih unggul, dan pestisida. Untuk itu, pemerintah berkewajiban untuk menjamin ketersediaan termasuk akses langsung pupuk, benih, dan pestisida kepada petani.

Pada Visi Misi Presiden dan Wakil Presiden terpilih juga dituliskan bahwasanya negara yang kuat adalah negara yang memiliki sistem pertahanan keamanan negara yang baik yang dapat melindungi dan menjamin kedamaian di dalam wilayah negara kesatuan. Sementera itu kemandirian bangsa mencerminkan kapabilitas sebuah bangsa untuk berdiri tanpa bergantung pada negara lain. Khusus untuk kemandirian bangsa, Indonesia perlu fokus pada yang mencapai swasembada dalam berbagai sektor krusial yang mencakup sektor pangan sebagai pilar kehidupan bangsa; sektor energi sebagai pendorong inovasi dan kemajuan; sektor air sebagai fondasi kehidupan yang berkelanjutan; dan sektor ekonomi kreatif yang memperlihatkan keunikan dan kekayaan budaya. Dengan sumber daya alam yang melimpah, ekonomi hijau akan mendorong pertumbuhan berkelanjutan tanpa merusak lingkungan dan ekonomi biru akan menekankan nilai penting dari kekayaan kelautan kita.

Dengan mengoptimalkan kesempatan di setiap sektor tersebut secara berkelanjutan, Indonesia mempertegas posisinya sebagai negara yang berdaulat. Atas dasar hal tersebut di atas, Prabowo dan Gibran berkomitmen untuk menghadirkan kemandirian dan kedaulatan negara dalam swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif dengan

berlandaskan ekonomi hijau dan ekonomi biru, melalui berbagai program dan rencana, termasuk peta jalannya (*road map*).

1. Menjalankan agenda Reformasi Agraria untuk memperbaiki kesejahteraan petani dalam arti luas sekaligus mendukung peningkatan produksi di sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan., dan kelautan.
2. Merevitalisasi dan membangun sebagian besar hutan rusak dan tidak termanfaatkan menjadi lahan untuk aren, ubi kayu, ubi jalar, sagu, sorghum, kelapa, dan bahan baku bioetanol lainnya dengan sistem tumpang sari untuk mendukung pencapaian kedaulatan energi nasional dan menciptakan jutaan lapangan kerja baru.
3. Menjamin ketersediaan pangan pokok yang berkelanjutan melalui BUMN *holding* pangan *ID FOOD*, menjamin harga pangan yang menguntungkan petani, peternak, dan nelayan, sekaligus terjangkau bagi konsumen.
4. Menjamin ketersediaan dan akses pupuk bagi petani untuk meningkatkan produksi, produktivitas panen dan hasil pertanian, serta pendapatan dan kesejahteraan petani.
5. Mempercepat pembangunan infrastruktur pertanian.
6. Memperpendek rantai distribusi hasil-hasil pertanian.
7. Meningkatkan produktivitas pertanian melalui peningkatan sarana prasarana pendukung pertanian rakyat, teknologi pangan terpadu, mekanisasi pertanian, inovasi digital (digital farming), dan memperbaiki tata kelola rantai nilai hasil pertanian.
8. Memperkuat industri pupuk dalam negeri dan mendorong pengembangan industri pupuk bio.
9. Menjadikan pengendalian hama terpadu (PHT) sebagai kebijakan utama dalam pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT), serta mendorong pemanfaatan pestisida nabati dan bio.

10. Memperkuat tata kelola impor pangan pokok dan utama agar lebih efektif dan optimal sehingga tetap mampu menjaga stabilitas dan kepastian harga di tingkat petani, terutama di saat panen raya.
11. Memperkuat program program di BUMN, universitas, dan lembaga penelitian di bidang pemuliaan tanaman dan teknologi benih.
12. Merevitalisasi jutaan hektar lahan yang rusak menjadi lahan produktif bagi peningkatan produksi pangan untuk mendukung kemandirian dan ketahanan pangan nasional.
13. Merehabilitasi hutan rusak menjadi hutan alam, Hutan Tanaman Industri (HTI), dan hutan produksi dengan menerapkan skema PPPP (*Public Private People Partnership*) dimana manfaat terbesar akan dirasakan oleh masyarakat.
14. Memberdayakan dan memperkuat peran dan fungsi BAPANAS, BULOG, bersama BUMN *holding* pangan *ID Food* sebagai regulator dan produsen pangan pokok yang strategis, baik untuk peningkatan produksi berkesinambungan, pertumbuhan ekspor, dan upaya stabilisasi harga kebutuhan pokok dan komoditas pertanian strategis lainnya.
15. Mendirikan lembaga pembiayaan untuk usaha tani rakyat untuk memperkuat struktur permodalan, menjamin keberlangsungan usaha, dan pengembangan usaha.
16. Memodernisasi model bisnis pertanian, tata niaga agribisnis, dan sistem pemasaran sektor pertanian melalui inovasi teknologi.
17. Melanjutkan dan menyempurnakan program kawasan sentra produksi pangan atau *food estate* secara berkelanjutan, terutama untuk komoditas padi, jagung, singkong, kedelai, dan tebu.
18. Memastikan kedaulatan pangan berbasis protein hasil laut melalui program perikanan budidaya laut (*marine aquaculture*) dan perikanan budidaya pantai (*coastal aquaculture*) serta perikanan laut dalam (*deep see fishing*).

Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan mengakomodir *Road Map* di point ke-17 (tujuh belas), yaitu melanjutkan dan menyempurnakan program kawasan sentra produksi pangan atau *food estate* secara berkelanjutan, terutama untuk komoditas padi, jagung, singkong, kedelai, dan tebu. Program *Food Estate* ini sudah dilaksanakan dari Tahun 2020 dan berlanjut sampai sekarang dengan adanya pembentukan korporasi di 7 (tujuh Kabupaten) di Provinsi Sumatera Selatan.

Untuk mencapai Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2025 akan melaksanakan beberapa program sebagai berikut:

1. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian.
2. Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan.
3. Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Hortikultura.
4. Program Pengelolaan Sistem Penyediaan Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura.
5. Program Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura.
6. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian.
7. Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Pemasaran dan Industri Hasil Pertanian.

Sedangkan untuk mencapai Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2025 pada sub sektor hortikultura akan melaksanakan beberapa program dan kegiatan sebagai berikut:

1. Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri (Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura).
2. Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas.
   a. Kegiatan Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura
   b. Kegiatan Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat
   c. Kegiatan Perbenihan Hortikultura
   d. Kegiatan Perlindungan Hortikultura
3. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian (Kegiatan Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman).
4. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian (Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi).

Beberapa permasalahan yang perlu untuk mendapatkan perhatian dalam pembangunan pertanian tanaman pangan dan hortikultura sebagai berikut:

1. Rendahnya penerapan teknologi budidaya tanaman pangan dan hortikultura terkait dengan:
   a. Rendahnya ketersediaan benih tanaman pangan dan hortikultura yang berkualitas.
   b. Terbatasnya akses pupuk untuk budidaya tanaman pangan dan hortikultura.
   c. Kurangnya kemampuan SDM Pertanian dalam menerapkan teknologi.
2. Keterbatasan alat dan mesin pertanian pra dan pascapanen terkait dengan:
   a. Distribusi bantuan alsintan pra dan pascapanen belum merata.

b. Kurang optimalnya pengelolaan Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA).

3. Rendahnya kapasitas kelembagaan dan ketenagaan penyuluhan pertanian terkait dengan:
   a. Belum seluruh Kelembagaan Penyuluhan (BPP dan kelompok tani) diklasifikasikan.
   b. Belum seluruh tenaga penyuluh yang mengikuti diklat dasar dan diklat teknis.
4. Alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian terkait sebagai berikut:
   a. Belum semua kabupaten/kota membuat perda tentang lahan pertanian pangan berkelanjutan.
   b. Belum adanya perbub/perwali yang menentukan luas lahan yang dilindungi disertai titik koordinat.
   c. Kerusakan jaringan irigasi primer, sekunder dan tersier.

Adapun Target dan langkah strategis Kementerian Pertanian (Kementan) untuk tahun 2025 adalah:

- Meningkatkan produksi beras, jagung, kedelai, aneka cabai, bawang merah, kopi, kakao, tebu, kelapa, daging sapi/kerbau, dan daging ayam
- Memperkuat cetak sawah, optimalisasi lahan, dan dukungan sarana-prasarana produksi
- Meningkatkan produksi susu dan daging sapi
- Menyiapkan benih unggul
- Menyediakan alat dan mesin pertanian (alsintan) prapanen
- Menyediakan pupuk bersubsidi
- Mengembangkan pertanian moden melalui pertanian milenial

Kementan mengalokasikan anggaran sebesar Rp29,37 triliun untuk tahun 2025.

Untuk mencapai swasembada pangan, Kementan dan Kementerian PU menekankan pentingnya sinergi antara program pertanian dan infrastruktur, khususnya dalam sektor irigasi.

Ada 5 strategi pembangunan pertanian untuk mendukung ketahanan pangan dan peningkatan daya saing berkelanjutan, seperti peningkatan kapasitas produksi, diversifikasi pangan lokal, penguatan cadangan dan sistem logistik pangan, serta pengembangan pertanian modern, dan gerakan tiga kali ekspor.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi. Tujuan disini adalah suatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan pada jangka waktu 5 (lima) tahun seperti yang telah dirumuskan dalam Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) tahun 2024-2026.

Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan menetapkan tujuan sebagai berikut :

1. Meningkatkan ketersediaan produksi tanaman pangan berkelanjutan.
2. Meningkatkan ketersediaan produksi hortikultura berkelanjutan.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan pada 5 (lima) tahun mendatang.

Sasaran Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, sehingga bersifat spesifik, terinci dapat diukur dan dapat dicapai. Sasaran tersebut merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dalam proses perencanaan strategis. Fokus utama penentuan sasaran, kendala, tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi.

Sasaran jangka menengah Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 adalah pertumbuhan produksi komoditas tanaman pangan dan hortikultura 2-5% per tahun. Dengan memperhatikan tujuan dan sasaran rencana Pembangunan Daerah Provinsi Tahun 2024-2026; Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai kewenangan daerah; serta mengindentifikasi permasalahan berdasarkan tugas fungsi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura maka hasil telaah ditetapkan tujuan dan sasaran.

Dinas Pertanian adalah Dinas yang mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang Pertanian serta tugas Perbantuan di sektor pertanian. Dinas ini mempunyai peranan yang sangat penting dalam membangun perekonomian nasional termasuk perekonomian daerah, karena sektor pertanian berfungsi sebagai penyedia bahan pangan untuk ketahanan pangan masyarakat, sebagai instrumen pengentasan kemiskinan, penyedia lapangan kerja, serta sumber pendapatan masyarakat.

Adapun sasaran-sasaran Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024 dirumuskan untuk masing-masing tujuan yang telah ditetapkan sebagai berikut:

Tujuan : Meningkatkan Perekonomian Sektor Unggulan melalui Peningkatan Nilai Tukar Petani Tanaman Pangan dan Hortikultura

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran
Meningkatnya Produksi dan Kualitas Produk Sektor Unggulan Pertanian.	Persentase Peningkatan Ketersediaan Produksi Tanaman Pangan :
	- Padi = 0,50 %
	- Jagung = 0,50 %
	- Kedelai = 5,00 %
	Persentase Peningkatan Produksi Hortikultura :
	- Cabe = 0,1 %
	- Bawang Merah = 0,1 %
	- Jeruk = 1,22 %
	- Nanas = 1,22 %
	- Sayuran = 1,22 %
	Persentase Peningkatan Produksi Komoditas Sektor Unggulan Pertanian yang Berkualitas = 40 %

Sedangkan untuk pembangunan pertanian diarahkan dapat meningkatkan kesejahteraan petani dengan meningkatkan ketahanan pangan dan daya saing pertanian. Salah satu tujuan utama pembangunan pertanian adalah meningkatkan kehidupan petani dan keluarganya yang lebih baik dan sejahtera. Hal tersebut bisa diraih dengan meningkatnya ketahanan pangan, nilai tambah dan daya saing pertanian. Kesejahteraan petani merupakan dampak (*impact*) dari tercapainya *outcome* program/kegiatan pembangunan pertanian.

Ketahanan pangan merupakan kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup ditinjau dari jumlah maupun mutu. Selain itu, menjamin pangan yang aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan. Daya saing pertanian adalah kemampuan di *sector* pertanian untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus mampu menggantikan produk pesaingnya dengan nilai tambah yang dihasilkan dalam setiap kegiatan produksi dan distribusi komoditas pertanian.

Ada 5 (lima) strategi pembangunan pertanian untuk mendukung ketahanan pangan dan peningkatan daya saing berkelanjutan, seperti peningkatan kapasitas produksi, diversifikasi pangan lokal, penguatan cadangan dan sistem logistik pangan, serta pengembangan pertanian modern, dan gerakan tiga kali ekspor. Kementerian Pertanian salah satunya akan mengembangkan Lahan Rawa di Sumatera Selatan menjadi areal tanam di tahun 2025 ini. Program Swasembada Pangan 2025 ini menjadi langkah strategis pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan nasional dengan memaksimalkan pemanfaatan lahan yang ada serta memperluas cakupan sawah untuk mendukung target swasembada pangan di tahun 2025

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Faktor-faktor yang Menjadi Bahan Pertimbangan terhadap Rumusan Program dan Kegiatan

a. Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

Sektor pertanian sendiri merupakan sektor yang memberikan kontribusi cukup besar dalam pembangunan perekonomian. Kontribusi sektor pertanian semakin kecil dengan berkembangnya suatu perekonomian. Karena semakin tinggi laju pertumbuhan ekonomi suatu negara maka tingkat pendapatan masyarakat juga meningkat.

Pembangunan pertanian di Sumatera Selatan disusun, direncanakan dan menyelaraskan dengan Visi dan Misi Penjabat Gubernur Sumatera Selatan. Dalam rangka mendukung visi dan misi tersebut, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan sebagai organisasi perangkat daerah yang bernaung di bawah Provinsi Sumatera Selatan mendukung pada Misi Penjabat Gubernur Pertama, yaitu :

1. Mengendalikan Kebakaran Hutan dan Lahan (KarHutLah)
2. Menyukseskan PiLeg dan PilKaDa di Sumatera Selatan
3. Mengendalikan Angka Stunting,
4. Mengendalikan Tingkat Inflasi, dan
5. Menurunkan Angka Kemiskinan Ekstrem dan Kemiskinan lainnya

Penjabat Gubernur selanjutnya dengan basic sebelumnya adalah Staf Ahli Kementerian Koordinator Perekonomian atau Kemenko Perekonomian yang juga menjabat sebagai Komisaris PT. Kereta Api Indonesia (KAI) diharapkan mampu mendongkrak perekonomian Sumatera Selatan dan memberikan kontribusi di sektor ekonomi karena ekonomi itu jantung dan titik keberhasilan suatu negara.

Berdasarkan Rancangan Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA), rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan dalam mencapai tujuan dan sasaran Rencana Strategis Tahun 2024-2026, yaitu;

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Perekonomian Sektor Unggulan	Meningkatnya Produksi Sektor Unggulan Pertanian	1. Meningkatkan akses petani terhadap saprodi berkualitas dan terjangkau melalui pengembangan sistem perbenihan, pengawasan peredaran dan kelancaran distribusi pupuk dan pestisida	1. Meningkatkan ketersediaan benih unggul, pupuk dan pestisida di tingkat petani 2. Meningkatkan kelancaran distribusi sarana produksi pertanian dari dan keluar sentra produksi komoditi tanaman pangan dan hortikultura
		2. Menjamin ketersediaan air di lahan irigasi dan non irigasi melalui peningkatan pembangunan/ rehabilitasi dan	1. Meningkatkan luas layanan air irigasi dan non irigasi untuk perluasan lahan siap tanam

		pemeliharaan jaringan irigasi tersier dan peningkatan ketersediaan air permukaan (embung)	
		3. Meningkatkan luas tanam untuk peningkatan produksi padi dalam rangka mendukung Sumsel Lumbung Pangan melalui peningkatan luas areal tanam dan peningkatan intensitas pertanaman	1. Meningkatkan produksi tanaman pangan dan hortikultura berkelanjutan
		4. Mengoptimalkan peran penyuluh pertanian dalam rangka peningkatan kapasitas kelembagaan dan ketenagaan penyuluhan pertanian	1. Menguatkan kelembagaan petani dan kelembagaan ekonomi petani berbasis kawasan pertanian
	Meningkatnya Kualitas Produk Sektor Unggulan Pertanian	Meningkatkan kemampuan petani dalam penanganan pasca panen, pengolahan hasil, pemasaran dan kemitraan	Meningkatkan pemasaran produk unggulan tanaman pangan dan hortikultura

a. Pencapaian SDGs

SDGs singkatan dari *Sustainable Development Goals* adalah program pembangunan berkelanjutan yang disusun negara-negara

anggota PBB pada 2015 dan diharapkan tercapai pada tahun 2030. SDGs dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang berisi 17 tujuan yang ingin dicapai untuk kesejahteraan masyarakat sekaligus tetap melestarikan lingkungan.

Ke-17 tujuan SDGs di atas saling keterkaitan dan saling mempengaruhi satu sama lain. Untuk mencapai tujuan SDGs, dibutuhkan kolaborasi dan kerja sama. SDGs ini menjadi komitmen global untuk mencapai pembangunan berkelanjutan yang lebih baik lahi. Setiap negara, termasuk Indonesia, memiliki tanggung jawab untuk mencapai tujuan SDGs. Dengan memperhatikan aspek keberlanjutan dalam setiap keputusan dan tindakan, kita dapat membangun masa depan yang lebih baik dan lebih berkelanjutan bagi generasi yang akan datang.

Dengan mengusung tema "Mengubah Dunia Kita: Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan", SDGs yang berisi 17 Tujuan dan 169 Target merupakan rencana aksi global untuk 15 tahun ke depan (berlaku sejak 2016 hingga 2030), guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan. SDGs berlaku bagi seluruh negara (universal), sehingga seluruh negara tanpa kecuali negara maju memiliki kewajiban moral untuk mencapai tujuan dan target SDGs. Tujuan pembangunan berkelanjutan adalah serangkaian tujuan yang dibuat oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai panduan bagi seluruh negara anggota untuk mencapai pembangunan berkelanjutan.

Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan berada pada Tujuan ke 2 yaitu : Tanpa Kelaparan dengan sasaran mengakhiri kelaparan, menacapai ketahanan pangan dan perbaikan nutrisi serta mempromosikan pertanian yang berkelanjutan. Kelaparan disebabkan karena kurangnya konsumsi pangan kronis. Dalam jangka panjang, kelaparan kronis berakibat buruk pada derajat kesehatan masyarakat yang menyebabkan tingginya

pengeluaran masyarakat untuk kesehatan. Target yang akan dicapai pada tahun 2030 pada point 2.3 yaitu menjamin pertanian pangan berkelanjutan, mengelola keragaman genetik, menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat penduduk asli, keluarga petani, penggembala dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan sama terhadap lahan, sumber daya produktif, dan input lainnya, pengetahuan, jasa keuangan, pasar, dan peluang nilai tambah, dan pekerjaan non pertanian dengan indikator SDGs nya adalah Nilai Tukar Petani (NTP).

NTP merupakan salah satu indikator yang berguna untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani karena mengukur kemampuan produk (komoditas) yang dihasilkan/dijual petani dibandingkan dengan produk yang dibutuhkan petani baik untuk proses produksi (usaha) maupun untuk konsumsi rumah tangga petani. Sejak Januari 2008, indeks harga yang diterima (IT) dan indeks harga yang dibayar petani (IB) serta NTP menggunakan tahun dasar 2007 dengan cakupan sebanyak 32 provinsi serta penyajian data untuk masing-masing sub sektor, sebelumnya indeks harga yang diterima petani dan indeks harga yang dibayar petani serta NTP menggunakan tahun dasar 1993 dengan cakupan provinsi sebanyak 23 provinsi

Data perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP) bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS).

- Indeks harga yang dibayar petani (IB) disusun berdasarkan data hasil survei bulanan statistik harga konsumen di pasar pedesaan yang dilaksanakan setiap bulan
- Indeks harga yang diterima petani (IT) bersumber dari hasil survei harga di tingkat produsen (farm gate) yang dilaksanakan setiap bulan

- IT dan IB tersebut dihitung dengan menggunakan formula Laspeyres yang dikembangkan
- NTP merupakan rasio antara IT dengan IB yang dinyatakan dalam persentase.

NTP mempunyai kegunaan untuk mengukur kemampuan tukar produk yang dijual petani dengan produk yang dibutuhkan petani dalam produksi dan konsumsi rumah tangga. NTP merupakan perbandingan indeks harga komoditas pertanian yang diproduksi oleh petani (It) terhadap indeks harga barang/ jasa yang dibayar petani untuk keperluan konsumsi rumah tangga dan biaya produksi (Ib), merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan/daya beli petani di daerah perdesaan.

Tabel Nilai Tukar Petani Per Subsektor Serta Persentase Perubahannya (2018=100)

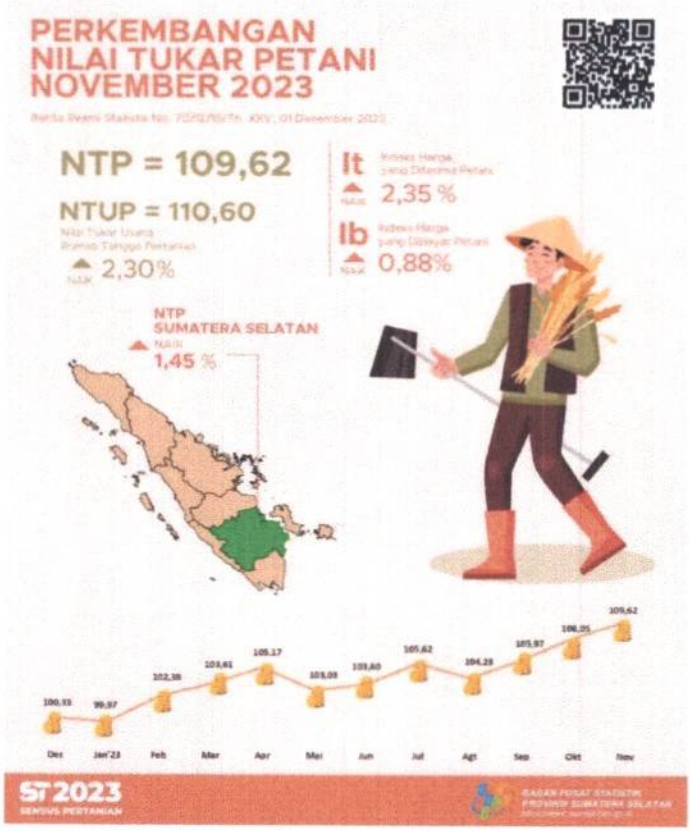

Sumber BPS Desember 2023

Keterangan Gambar :

- Kenaikan NTP November 2023 dipengaruhi oleh kenaikan NTP yang pada subsektor Tanaman Pangan sebesar 0,16 persen, Hortikultura sebesar 6,64 persen dan Perkebunan 1,80 persen. Sedangkan NTP yang mengalami penurunan yaitu pada subsektor Peternakan 1,34 persen, Perikanan 0,63 persen, Perikanan Tangkap 0,35 persen dan Perikanan Budidaya 1,03 persen.
- Pada November 2023, Indeks Konsumsi Rumah Tangga (IKRT) Provinsi Sumatera Selatan mengalami kenaikan sebesar 1,12 persen, yaitu dari 119,35 menjadi 120,69.
- Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian (NTUP) Provinsi Sumatera Selatan November 2023 sebesar 110,60 atau naik 2,30 persen dibanding NTUP bulan sebelumnya.

b. Pengentasan Kemiskinan

Pada tahun 2023, angka kemiskinan di Sumatera Selatan (Sumsel) turun dari 11,95% pada tahun 2022 menjadi 11,78%. Beberapa upaya yang dilakukan untuk menekan angka kemiskinan di Sumsel, antara lain:

- Mengurangi beban konsumsi
- Membantu dan memberdayakan komoditas tertentu agar memiliki pendapatan sendiri
- Melaksanakan program-program yang telah ditetapkan oleh gubernur

Beberapa faktor yang dapat menyebabkan kemiskinan, antara lain: Laju pertumbuhan penduduk yang tinggi, Meningkatnya jumlah pengangguran, Pendidikan yang rendah, Terjadi bencana alam, Distribusi pendapatan yang tidak merata.

Sebagai strategi jangka pendek untuk menekan angka kemiskinan, pemerintah dapat melanjutkan program bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari Dana Desa.

Provinsi Sumatera Selatan di bawah kepemimpinan Gubernur SumSel H. Herman Deru mampu menurunkan angka kemiskinan ekstrem dari 3,19 persen pada tahun 2022 menjadi 1,41% di tahun 2023. Hal ini terungkap saat Gubernur SumSel H. Herman Deru menerima audensi Kepala BPS SumSel dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan Malam Puncak Penutupan Hari Statistik Nasional Tahun 2023 di Kota Palembang dan penyampaian data indikator strategis Sumatera Selatan pada hari Jum'at tanggal 22 September 2023.

Kemiskinan pada dasarnya dipengaruhi oleh berbagai hal, antara lain faktor budaya dan karakter daerah. Dukungan program dan kegiatan Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP) dalam menurunkan angka kemiskinan mulai terlihat. Gerakan yang mengubah mindset masyarakat semula hanya sebagai konsumen kemudian perlu diubah sebagai produsen dan mampu menghasilkan produk pertanian yang layak dibudidayakan di lingkungan sekitar rumah tangga melalui pengembangan ketersediaan, distribusi dan konsumsi yang berkelanjutan sehingga dapat mengurangi pengeluaran rumah tangga. Perubahan pola pikir dan mindset masyarakat secara masif ini diharapkan akan mengurangi dampak kemiskinan dan inflasi harga komoditas pertanian.

Tabel IV.1. Data tingkat kemiskinan 17 Kabupaten / Kota di Sumatera Selatan Tahun 2022-2023

Kabupaten/Kota	Persentase Penduduk Miskin menurut Kabupaten/Kota (Persen)	
	2022	2023
Sumatera Selatan	11.90	11,78
Ogan Komering Ulu	11.61	11,46
Ogan Komering Ilir	13.23	13,15
Muara Enim	11.12	10,93
Lahat	15.61	15
Musi Rawas	13.34	14,13
Musi Banyuasin	15.19	14,9
Banyuasin	10.00	9,58
Ogan Komering Ulu Selatan	10.56	10,36
Ogan Komering Ulu Timur	10.05	9,99
Ogan Ilir	12.33	13,28
Empat Lawang	12.03	11,8
Pali	11.76	10,91
Musi Rawas Utara	18.45	18,26
Palembang	10.48	10,22
Prabumulih	11.28	11,23
Pagar Alam	8.47	8,88
Lubuk Linggau	12.68	12,65

Sumber : Susenas Maret

Access Time: October 21, 2024

Strategi Sektor Pertanian dalam upaya penurunan angka kemiskinan yang dilakukan oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan adalah dengan cara peningkatan produksi dan produktivitas komoditi hortikultura melalui program dan kegiatan yaitu Perbaikan Luas Baku Sawah (LBS), Dukungan di Lokasi Kerangka Sampel Area (KSA), Kegiatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Food Estate), Optimalisasi Petugas Pendamping Peningkatan Ekonomi Pertanian (PPEP), Perbaikan Data SIMLUHTAN dan Serapan KUR. Selain itu melalui Gerakan Sumsel Mandiri Pangan dengan adanya dukungan PPEP Pertanian sebanyak 1.400 orang. Sasaran GSMP ini adalah RTM 12 persentil pada data

DTKS. Persentil 12 ke atas ini masyarakat miskin dan hampir miskin, harus dijaga agar tidak jatuh miskin atau bertambah dalam dan parah kemiskinannya. Konsep ***Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP)*** yaitu Kondisi Masyarakat yang Mempunyai KEMAMPUAN untuk mewujudkan ketahanan pangan dan gizi KELUARGA melalui pengembangan KETERSEDIAAN, DISTRIBUSI dan KONSUMSI pangan dengan memanfaatkan sumber daya setempat secara BERKELANJUTAN melalui Perubahan Pola Pikir dari KONSUMEN menjadi PRODUSEN (Herman Deru, 2021). Diharapkan dengan adanya gerakan GSMP ini dapat menurunkan angka kemiskinan di 17 Kab/Kota Se-Sumatera Selatan dan keluarga mandiri pangan dalam pemenuhan gizi keluarga.

4.2. Program dan Kegiatan Tahun 2025

Program dan kegiatan serta anggaran prioritas untuk pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2025 yaitu adalah Rp. 130.902.335.825,- yang terdiri dari 5 (lima) program dan 15 (lima belas) kegiatan yang bersumber dari dana APBD. Adapun rincian program dan kegiatan melalui dana APBD adalah sebagai berikut:

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi** dengan dana sebesar Rp. 55.126.248.000,-

   Kegiatan:

   1) **Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah,** target Laporan Kinerja Tahunan (dok) sebesar 100% dengan dana sebesar Rp. 1.020.000.000,-

2) **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah,** target Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran (%) sebesar 100% dengan dana sebesar Rp. 44.207.408.000,-

3) **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah,** target Persentase Layanan Kelancaran Administrasi Perkantoran (%) sebesar 100% dengan dana sebesar Rp. 175.000.000,-

4) **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah,** target Persentase Pegawai yang Ditingkatkan Kapasitasnya (%) sebesar 100% dengan dana sebesar Rp. 146.200.000,-

5) **Administrasi Umum Perangkat Daerah,** target Persentase Layanan Kelancaran Administrasi Perkantoran (%) sebesar 100% dengan dana sebesar Rp. 4.877.640.000,-

6) **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah,** target Persentase Layanan Kelancaran Administrasi Perkantoran (%) sebesar 100% dengan dana sebesar Rp. 1.675.000.000,-

7) **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah,** target Persentase Layanan Kelancaran Administrasi Perkantoran (%) sebesar 100% dengan dana sebesar Rp. 3.025.000.000,-

2. **Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian** dengan dana sebesar Rp. 35.139.500.000,-

Kegiatan:

1) **Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian,** target Jumlah Pengawasan Peredaran Sarana TPH yang difasilitas (dok) dengan dana sebesar Rp. 27.394.400.400,-

2) **Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman,** target Jumlah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih TPH yang Difasilitasi (dok) dengan dana sebesar Rp. 7.745.099.600,-

3. **Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian** dengan dana sebesar Rp. 3.790.358.000,-

   Kegiatan:

   1) **Penataan Sarana Pertanian,** target Jumlah Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian yang difasilitasi (dok) dengan dana sebesar Rp. 3.790.358.000,-

4. **Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian** dengan dana sebesar Rp. 830.000.000,-

   Kegiatan:

   1) **Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan,** target Jumlah Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang difasilitas (dok) dengan dana sebesar Rp. 630.000.000,-

   2) **Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan,** target Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang Difasilitasi (dok) dengan dana sebesar Rp. 200.000.000,-

5. **Program Penyuluhan Pertanian** dengan dana sebesar Rp. 36.016.229.825,-

Kegiatan :

1) ***Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian***, target Jumlah Ketenagaan Penyuluhan Pertanian yang Difasilitasi (Dok) dengan dana sebesar Rp. 850.000.000,-
2) ***Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian,*** target Jumlah Penerapan Penyuluhan Pertanian yang Difasilitasi (Dok) dengan dana sebesar Rp. 34.331.229.825,-
3) ***Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan,*** target Jumlah Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan yang Difasilitasi (Dok) dengan dana sebesar Rp. 835.000.000,-

BAB V

PENUTUP

Dalam pelaksanaan penyusunan serta penetapan berbagai program dan kegiatan pembangunan ditujukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan produk perencanaan yang diukur berdasarkan sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Perubahan Rancangan Rencana Strategis Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026.

Rencana kerja ini diharapkan dapat berfungsi sebagai pedoman dan arahan dalam melaksanakan dan mengendalikan kegiatan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2025, sehingga tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dapat lebih terarah dan terukur. Serta dapat memberikan pedoman dan arahan bagi *stakeholder* pembangunan pertanian untuk lebih mudah berperan aktif dalam pembangunan. Lebih dari itu dengan adanya Renja akan dapat menjadi sarana dalam mewujudkan akuntabilitas Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan dalam memberikan pelayanan publik, sekaligus meningkatkan kinerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) mensyaratkan pentingnya keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik di dalam satu program ataupun antar program dengan tetap memperhatikan peran, tanggungjawab dan tugas yang melekat pada Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Rencana Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan merupakan dasar evaluasi kinerja

dan laporan akuntabilitas bagi pengukuran kinerja kegiatan maupun pencapaian sasaran program serta kegiatan Dinas Tahun 2025.

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan ini disusun berdasarkan skala prioritas pembangunan pertanian Sumatera Selatan Tahun 2025 dengan harapan terjaminnya kelancaran, keserasian, dan keterpaduan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintah dalam pembangunan di bidang pertanian. Rencana Kerja merupakan dokumen yang berisi arah dan langkah Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura dalam mencapai visi dan misi untuk kurun waktu satu tahun ke depan di tahun 2025. Keberhasilan pelaksanaan Renja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan memerlukan dukungan dari semua pihak yang berkepentingan, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Palembang, 2024

Kepala Dinas,

Dr. Ir. H. R. Bambang Pramono, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 196703151990031004

Tabel T-C.32

Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026

Provinsi Sumatera Selatan

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan

Nomor	Kode	Permendagri 90 Tahun 2019 (Kepmendagri 050-3708)	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Kegiatan Prioritas Daerah	Kegiatan Prioritas Nasional
		Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
	3.27.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah (%)**		**100**	**54.648.727.846**			**100**	**56.402.970.000**		
	3.27.01.1.01	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Laporan Kinerja Tahunan (dok)**		**6**	**2.325.000.000**			**6**	**2.325.000.000**		
	3.27.01.1.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah (dok)	Palembang	3	1.775.000.000	PAD		3	1.775.000.000	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Reformasi Sistem Akuntabilitas Kinerja
		Penyusunan Rencana Kerja (Renja)	Jumlah dokumen penyusunan rencana kerja (dok)	Palembang	1	205.000.000	PAD		1	205.000.000		
		Penyusunan Programa Penyuluhan Pertanian	Jumlah dokumen programa penyuluhan pertanian (dok)	17 kab/kota	1	70.000.000	PAD		1	70.000.000		
		Pengembangan Penguatan Kawasan Sentra Produksi	Jumlah dokumen penguatan kawasan sentra produksi (dok)	OKI, OI, OKUT, ME, BA, Mura, Muba	1	1.500.000.000	PAD		1	1.500.000.000		
	3.27.01.1.01.07	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah (laporan)	17 kab/kota	3	550.000.000	PAD		3	550.000.000	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Reformasi Sistem Akuntabilitas Kinerja
		Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah dokumen evaluasi (dok)	17 kab/kota	1	200.000.000	PAD		1	200.000.000		
		Ubinan Padi, Jagung dan Kedelai	Jumlah dokumen ubinan (dok)	17 kab/kota	1	150.000.000	PAD		1	150.000.000		
		Pengumpulan dan Validasi Data Statistik	Jumlah dokumen justifikasi capaian angka produksi dan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura (dok)	17 kab/kota	1	200.000.000	PAD		1	200.000.000		
	3.27.01.1.02	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)**		**100**	**45.957.360.021**			**100**	**46.523.030.000**		
	3.27.01.1.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN (org)	Palembang	325	42.738.220.021	DAU		325	43.303.890.000	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Reformasi Sistem Akuntabilitas Kinerja
	3.27.01.1.02.02	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN (dokumen)	Palembang 4 UPTD	5	3.219.140.000	PAD		5	3.219.140.000	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Reformasi Sistem Akuntabilitas Kinerja
		Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan (org)	Palembang	13	67.740.000	PAD		13	67.740.000		
			Jumlah bendahara yang dibayarkan honornya (Org)	Palembang 4 UPTD	6	29.400.000	PAD		6	29.400.000		
		Penyediaan jasa tenaga kebersihan	Penyediaan petugas kebersihan pada dinas dan UPTD (Kegiatan)	Palembang 4 UPTD	1	576.810.000	PAD		1	576.810.000		

Nomor	Kode	Permendagri 90 Tahun 2019 (Kepmendagri 050-3708)	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Kegiatan Prioritas Daerah	Kegiatan Prioritas Nasional
		Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
		Penyediaan jasa pendukung administrasi teknis/ perkantoran	Jumlah petugas administrasi teknis/ perkantoran pada dinas dan 4 UPTD (org)	Palembang	72	1.518.150.000	PAD		72	1.518.150.000		
		Penyediaan Jasa Tutor SKJ	Jumlah pelaksanaan kegiatan SKJ (Kali)	Palembang 4 UPTD	44	77.000.000	PAD		44	77.000.000		
		Penyediaan jasa tenaga keamanan	Penyediaan penjaga keamanan pada Dinas dan 4 UPTD (Kegiatan)	Palembang 4 UPTD	1	950.040.000	PAD		1	950.040.000		
	3.27.01.1.03	**Kegiatan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah**	**Persentase Layanan Kelancaran Administrasi Perkantoran (%)**		**100**	**175.000.000**			**100**	**175.000.000**		
	3.27.01.1.03.02	Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah SKPD (dok)	Palembang	1	75.000.000	PAD		1	75.000.000	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Reformasi Sistem Akuntabilitas Kinerja
		Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Jumlah kendaraan roda 4 yang diasuransikan pada Dinas dan 4 UPTD (Unit)	Palembang	10	75.000.000	PAD		10	75.000.000		
	3.27.01.1.03.04	Sub Kegiatan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan hasil pembinaan, pengawasan dan pengendalian barang milik daerah (laporan)	17 kab/kota	1	100.000.000	PAD		1	100.000.000	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Reformasi Sistem Akuntabilitas Kinerja
		Inventarisasi asset satuan kerja dinas pertanian tanaman pangan dan hortikultura prov. Sumsel	Jumlah dokumen inventarisasi asset (dok)	17 kab/kota	1	100.000.000			1	100.000.000		
	3.27.01.1.05	**Kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah**				**421.927.825**				**350.000.000**		
			Persentase Ketaatan terhadap aturan kepegawaian (%)		**100**				**100**			
			Persentase pegawai yang ditingkatkan kapasitasnya (%)		**100**				**100**			
	3.27.01.1.05.02	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	Palembang		321.927.825	PAD		450	200.000.000	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Reformasi Sistem Akuntabilitas Kinerja
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya (pasang/setelan)	Palembang		321.927.825			450	200.000.000		
	3.27.01.1.05.09	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (orang)	Palembang	10	100.000.000	PAD		10	150.000.000	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Reformasi Sistem Akuntabilitas Kinerja
		Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah SDM yang meningkat kapasitasnya (org)	Palembang	10	100.000.000	PAD		10	150.000.000		
	3.27.01.1.06	**Kegiatan administrasi umum perangkat daerah**	**Persentase Layanan Kelancaran Administrasi Perkantoran (%)**		**100**	**2.944.440.000**			**100**	**3.045.440.000**		
	3.27.01.1.06.01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan (paket)	Palembang 4 UPTD	1	50.000.000	PAD		1	50.000.000	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Reformasi Sistem Akuntabilitas Kinerja
		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik pada Dinas dan 4 UPTD (jenis)	Palembang 4 UPTD	1	50.000.000	PAD		1	50.000.000		

Nomor	Kode	Permendagri 90 Tahun 2019 (Kepmendagri 050-3708)	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Kegiatan Prioritas Daerah	Kegiatan Prioritas Nasional
		Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
	3.27.01.1.06.02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (paket)	Palembang	1	299.000.000	PAD		1	400.000.000	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Reformasi Sistem Akuntabilitas Kinerja
		Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor (Jenis)	Palembang	3	-	PAD		-	200.000.000		
		Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perelengkapan Kantor (Jenis)	Palembang	3	299.000.000	PAD		3	200.000.000		
	3.27.01.1.06.04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan (paket)	Palembang	2	200.000.000	PAD		2	200.000.000	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Reformasi Sistem Akuntabilitas Kinerja
		Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah penyediaan ATK pada Dinas dan 4 UPTD (paket)	Palembang	1	100.000.000	PAD		1	100.000.000		
		Penyediaan peralatan dan bahan pembersih	Jumlah peralatan kebersihan dan bahan pembersih pada Dinas dan 4 UPTD (jenis)	Palembang	1	100.000.000	PAD		1	100.000.000		
	3.27.01.1.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan (paket)	Palembang		50.000.000	PAD		1	50.000.000	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Reformasi Sistem Akuntabilitas Kinerja
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan pada Dinas dan 4 UPTD (tahun)	Palembang	1	50.000.000	PAD		1	50.000.000		
	3.27.01.1.06.06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan (dokumen)	Palembang	1	55.000.000	PAD		1	55.000.000	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Reformasi Sistem Akuntabilitas Kinerja
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah surat kabar/majalah pada Dinas dan 4 UPTD (kegiatan)	Palembang	1	55.000.000	PAD		1	55.000.000		
	3.27.01.1.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi (laporan)	17 kab/kota	2	1.290.440.000	PAD		2	1.290.440.000	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Reformasi Sistem Akuntabilitas Kinerja
		Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah penyediaan makanan dan minuman rapat dan senam pada Dinas dan 4 UPTD (kegiatan)	Palembang	1	150.000.000	PAD		1	150.000.000		
		Koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah, keluar daerah dan luar negeri	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah pada Dinas dan 4 UPTD (kegiatan)	17 kab/kota	1	815.440.000	PAD		1	815.440.000		
			Jumlah perjalanan dinas luar daerah pada Dinas dan 4 UPTD (kegiatan)	luar provinsi	1	325.000.000	PAD		1	325.000.000		
	3.27.01.1.06.11	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SIPD	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD (dokumen)	Palembang	1	1.000.000.000	PAD		1	1.000.000.000	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Reformasi Sistem Akuntabilitas Kinerja
		Belanja bahan pendukung lainnya		Palembang		50.000.000	PAD		1	50.000.000		
		Publikasi dan promosi capaian kinerja		Palembang		450.000.000	PAD		1	450.000.000		
		Updating aplikasi		Palembang		500.000.000	PAD		1	500.000.000		

Nomor	Kode	Permendagri 90 Tahun 2019 (Kepmendagri 050-3708)	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Kegiatan Prioritas Daerah	Kegiatan Prioritas Nasional
		Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
	3.27.01.1.07	**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Layanan Kelancaran Administrasi Perkantoran (%)**			-			**100**	**1.359.500.000**		
	3.27.01.1.07.02	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (unit)	Palembang		-	PAD		2	1.359.500.000	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Reformasi Sistem Akuntabilitas Kinerja
		Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional Roda 4 (unit)	Palembang		-	PAD		2	1.359.500.000		
	3.27.01.1.08	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Layanan Kelancaran Administrasi Perkantoran (%)**		**100**	**965.000.000**			**100**	**965.000.000**		
	3.27.01.1.08.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat (laporan)	Palembang	1	5.000.000	PAD		1	5.000.000	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Reformasi Sistem Akuntabilitas Kinerja
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah penyediaan jasa paket/pengiriman pada Dinas dan 4 UPTD (kegiatan)	Palembang	1	500.000	PAD		1	500.000		
			Jumlah penyediaan jasa benda pos lainnya pada Dinas dan 4 UPTD (Lbr)	Palembang	400	4.000.000	PAD		400	4.000.000		
			Jumlah penyediaan buku cek (kegiatan)	Palembang	1	500.000	PAD		400	500.000		
	3.27.01.1.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, SDA, dan listrik yang disediakan (laporan)	Palembang 4 UPTD	1	960.000.000	PAD		1	960.000.000	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Reformasi Sistem Akuntabilitas Kinerja
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan jasa telepon pada Dinas dan 4 UPTD (kegiatan)	Palembang 4 UPTD	1	100.000.000	PAD		1	100.000.000		
			Jumlah penyediaan jasa air pada Dinas dan 4 UPTD (kegiatan)	Palembang 4 UPTD	1	80.000.000	PAD		1	80.000.000		
			Jumlah penyediaan jasa listrik pada Dinas dan 4 UPTD (kegiatan)	Palembang 4 UPTD	1	700.000.000	PAD		1	700.000.000		
			Jumlah penyediaan jasa Internet pada Dinas dan 4 UPTD (kegiatan)	Palembang 4 UPTD	1	80.000.000	PAD		1	80.000.000		
	3.27.01.1.09	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Layanan Kelancaran Administrasi Perkantoran (%)**		**100**	**1.860.000.000**	PAD		**100**	**1.660.000.000**		
	3.27.01.1.09.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya (unit)	Palembang 4 UPTD	253	900.000.000	PAD		253	900.000.000	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Reformasi Sistem Akuntabilitas Kinerja
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah kendaraan roda 4 yang dipelihara pada Dinas dan 4 UPTD (Unit)		25	525.000.000			25	525.000.000		
			Jumlah kendaraan roda 4 yang dibayarkan pajaknya pada Dinas dan 4 UPTD (Unit)		25	110.000.000			25	110.000.000		
			Jumlah kendaraan roda 2 yang dibayarkan pajaknya pada Dinas dan 4 UPTD (Unit)		175				175			
			Jumlah kendaraan roda 4 yang mendapat layanan BBM pada Dinas dan 4 UPTD (Unit)		13	265.000.000			13	265.000.000		

Nomor	Kode	Permendagri 90 Tahun 2019 (Kepmendagri 050-3708)	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Kegiatan Prioritas Daerah	Kegiatan Prioritas Nasional
		Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
	3.27.01.1.09.06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (unit)	Palembang 4 UPTD	135	160.000.000	PAD		135	160.000.000	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Reformasi Sistem Akuntabilitas Kinerja
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki pada Dinas dan 4 UPTD (kegiatan)		3	160.000.000			3	160.000.000		
	3.27.01.1.09.09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (unit)	Palembang 4 UPTD	2	800.000.000	PAD		2	600.000.000	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Reformasi Sistem Akuntabilitas Kinerja
		Rehabilitasi Ringan/ Sedang/Berat Gedung Kantor	Gedung Kantor yang sudah diperbaiki (unit)		1	800.000.000			2	600.000.000		
	3.27.02	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**Luas Pengembangan Tanaman Pangan dan Hortikultura :**	**17 kab/kota**		**34.454.500.000**	**PAD**			**36.215.930.400**		
			- Padi (Ha)		**10.000**				**10.000**			
			- Jagung (Ha)		**5.000**				**5.000**			
			- Cabe (Ha)		**6**				**6**			
			- Bawang Merah (Ha)		**6**				**6**			
			- Jeruk (Ha)		**20**				**20**			
			- Nanas (Ha)		**5**				**5**			
	3.27.02.1.01	**Kegiatan Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian**	**Jumlah Pengawasan Peredaran Sarana TPH yang difasilitasi (dok)**	**17 kab/kota**	**5**	**30.709.400.400**	**PAD**		**2**	**31.009.400.400**		
	3.27.02.1.01.01	Sub Kegiatan Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran pupuk, pestisida, alsintan dan sarana pendukung pertanian (laporan)	17 kab/kota	4	30.709.400.400	PAD		4	31.009.400.400	Penyediaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian	Peningkatan Ketersediaan Pangan Hasil Pertanian, Perikanan dan Pangan Hasil Laut Secara Berkelanjutan
		Penyediaan Sarana Produksi Pengembangan Tanaman Padi, Jagung dan kedelai	Luas pengembangan tanaman (Ha) :			28.322.900.400	PAD			28.322.900.400		
			- Padi (Ha)	Muba, ME, Mura, OKI, BA, OKUT, OI	10.000				10.000			
			- Jagung (Ha)	Lahat, ME, 4L, Prabu, PGA, LL, Pali	2.000				2.000			
		Penyediaan Sarana Produksi Pengembangan Tanaman Buah	Luas pengembangan tanaman (Ha) :			585.000.000	PAD			585.000.000		
			- Jeruk (Ha)	OKU, OKUT, OI	15				15			
			- Nenas (Ha)	Prabu	3				3			
		Penyediaan Sarana Produksi Pengembangan Tanaman Sayuran	Luas pengembangan tanaman (Ha) :			651.500.000	PAD			651.500.000		
			- Cabe (Ha)	Muba, OKI, OKU	6				6			
			- Bawang Merah (Ha)	OKU, OI Muratara	6				6			

Nomor	Kode	Permendagri 90 Tahun 2019 (Kepmendagri 050-3708)	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Kegiatan Prioritas Daerah	Kegiatan Prioritas Nasional
		Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
		Pembinaan, Pengawasan, Pemanfaatan Pupuk dan Pestisida	Dokumen Pembinaan, Pengawasan, Pemanfaatan Pupuk dan Pestisida (dok)	17 kab/kota	1	150.000.000	PAD		1	200.000.000		
		Pengembangan Unit Pelayanan Jasa Alsintan	Jumlah UPJA yang dibina (Unit)	17 kab/kota	105	200.000.000	PAD		105	250.000.000		
		Penyediaan Alat Pra Panen Tanaman Pangan dan Hortikultura	Jumlah alat dan mesin pra panen yang diserahkan kepada masyarakat (unit) :									
			- Traktor Roda 2 (Unit)	Lahat, Muba, Mura, ME, OKI, OKU, OKUT, OKUS, OI, 4L, Muratara, Pali	20	700.000.000	PAD		20	800.000.000		
		Penyediaan Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura				100.000.000	PAD			200.000.000		
			Jumlah UPH tanaman pangan yang ditumbuh kembangkan (unit)	Muba, OKU, BA, PLG, PGA	5				5			
			Jumlah unit pengolahan hortikultura yang ditumbuhkembangkan (unit)	ME, OKU, OKUS, Prabu	4				4			
			Jumlah kelompok mutu organik yang dibina (unit)	MURA, OKUT	2				2			
	3.27.02.1.02	**Kegiatan Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman**	**Jumlah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan peredaran benih TPH yang difasilitasi (dok)**			**3.745.099.600**				**5.206.530.000**		
	3.27.02.1.02.01	Sub Kegiatan Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	Jumlah sertifikat benih (sertifikat)	17 kab/kota	16	500.000.000			16	666.000.000	Penyediaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian	Peningkatan Ketersediaan Pangan Hasil Pertanian, Perikanan dan Pangan Hasil Laut Secara Berkelanjutan
		Pengawasan Peredaran Benih Tanaman Hortikultura	Jumlah dokumen		2				2			
		Monitoring Pengawasan dan Peredaran Benih Tanaman Pangan	Jumlah dokumen		1				1			

Nomor	Kode	Permendagri 90 Tahun 2019 (Kepmendagri 050-3708)	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Kegiatan Prioritas Daerah	Kegiatan Prioritas Nasional
		Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
	3.27.02.1.02.05	Sub Kegiatan Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan	Jumlah pengawasan mutu, penyediaan dan peredaran benih/ bibit hortikultura (laporan)	17 kab/kota	3	3.245.099.600	PAD		3	4.540.530.000	Penyediaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian	Peningkatan Ketersediaan Pangan Hasil Pertanian, Perikanan dan Pangan Hasil Laut Secara Berkelanjutan
		Perbanyakan Benih Tanaman Hortikultura di Balai Benih Induk	Jumlah benih/bibit hortikultura yang memenuhi persyaratan mutu, penyediaan dan peredaran	BBIH Jarai, BBIH Sijacarana, Palembang		1.685.572.300	PAD			2.981.000.000		
			Alpukat (btg)		3.050				3.050			
			Manggis (btg)		2.000				2.000			
			Durian (btg)		2.000				2.000			
			Duku (btg)		2.000				2.000			
		Perbanyakan Benih Unggul dan Pemeliharaan Koleksi Plasma Nutfah Tanaman Florikultura dan Hortikultura Lainnya	Jumlah bibit florikultura yang tersedia : anggrek tanah (batang)	Kebun Kenten	490	265.000.000	PAD		490	265.000.000		
		Kebun Percontohan Tanaman Sayuran dan Tanaman Buah-buahan	Jumlah dokumen kebun percontohan tanaman sayuran dan buah-buahan (dok)	Palembang Pagaralam, Pali, Muara Enim, Lahat	2	644.527.300	PAD		2	644.530.000		
		Perbanyakan Benih Unggul Padi di Balai Benih Induk	Luas perbanyakan benih padi kelas benih pokok (Ha)	BBI Upang, BBI Belitang								
			- Padi (Ha)		8	350.000.000	PAD		8	350.000.000		
		Pembinaan, Pengawalan dan Pengukuran Susut Hasil Manual dan Mekanis Tanaman Pangan	Dokumen Pembinaan, Pengawalan dan Pengukuran Susut Hasil Manual da Mekanis Tanaman Pangan (dok)	17 kab/kota		300.000.000			2	300.000.000		
	3.27.03	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**Peningkatan Luas Lahan Siap Tanam :**			**2.600.000.000**				**4.300.000.000**		
			- Padi (Ha)		**100**				**100**			
	3.27.03.1.01	**Kegiatan Penataan Prasarana Pertanian**	**Jumlah Prasarana Pertanian TPH yang difasilitasi (unit)**		**4**	**2.600.000.000**			**4**	**4.300.000.000**		
	3.27.03.1.01.04	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	Jumlah koordinasi, sinkronisasi dan pengelolaan jaringan irigasi di tingkat usaha tani (dok)	BA	1	2.300.000.000	PAD		1	4.000.000.000	Penyediaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian	Peningkatan Ketersediaan Pangan Hasil Pertanian, Perikanan dan Pangan Hasil Laut Secara Berkelanjutan
	3.27.03.1.01.10	Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Jumlah gedung UPTD Pertanian serta sarana pendukungnya yang dibangun, dipelihara dan direhabilitasi (unit)	3 UPTD lingkup Dinas Pertanian TPH	3	300.000.000	PAD		3	300.000.000	Penyediaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian	Peningkatan Ketersediaan Pangan Hasil Pertanian, Perikanan dan Pangan Hasil Laut Secara Berkelanjutan

Nomor	Kode	Permendagri 90 Tahun 2019 (Kepmendagri 050-3708)	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Kegiatan Prioritas Daerah	Kegiatan Prioritas Nasional
		Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
	3.27.05.	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	**Luas Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi :**			**700.000.000**				**700.000.000**		
			- Tanaman Pangan (Ha)	17 kab/kota	**520**				**520**			
			- Hortikultura (Ha)	17 kab/kota	**97**				**97**			
	3.27.05.1.01	**Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi**	**Jumlah Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian TPH yang difasilitasi (kali)**	17 kab/kota	**220**	**700.000.000**	PAD		**220**	**700.000.000**		
	3.27.05.1.01.01	Sub Kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Jumlah luas serangan OPT tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan yang dikendalikan (ha)	17 kab/kota	2.500	500.000.000	PAD		2.500	500.000.000	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Peningkatan Ketersediaan Pangan Hasil Pertanian, Perikanan dan Pangan Hasil Laut Secara Berkelanjutan
	3.27.05.1.01.02	Sub Kegiatan Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani (ha)	17 kab/kota	400	200.000.000	PAD		400	200.000.000	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Peningkatan Ketersediaan Pangan Hasil Pertanian, Perikanan dan Pangan Hasil Laut Secara Berkelanjutan
	3.27.07	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**				**34.800.000.000**				**35.150.000.000**		
			Jumlah kelembagaan penyuluh yang meningkat kapasitasnya (unit)	17 kab/kota	**34**				**34**			
			Jumlah Kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya (unit)	17 kab/kota	**1.400**				**1.400**			
			Jumlah kemitraan usaha tani (unit)	17 kab/kota	**20**				**20**			
	3.27.07.1.01	**Kegiatan Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian**	**Jumlah ketenagaan penyuluhan pertanian yang ditingkatkan kapasitasnya (orang)**		**45**	**350.000.000**			**45**	**550.000.000**		
	3.27.07.1.01.04	Sub Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Penyuluh Pertanian	Jumlah Penyuluh Pertanian ASN yang Telah Mengikuti Pengembangan Kompetensi melalui Pendidikan dan Pelatihan (org)	Balai Pelatihan Penyuluhan Pertanian (OKU Timur) dan Palembang	45	350.000.000	PAD		60	550.000.000	Penyuluhan Pertanian	Peningkatan Produktivitas, Kesejahteraan Sumber Daya Manusia (SDM) Pertanian, Perikanan dan Kepastian Pasar

Nomor	Kode	Permendagri 90 Tahun 2019 (Kepmendagri 050-3708) Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Kegiatan Prioritas Daerah	Kegiatan Prioritas Nasional
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
	3.27.07.1.02	**Kegiatan Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian**	**Jumlah penerapan penyuluhan pertanian yang difasilitasi (dok)**		**2**	**34.250.000.000**			**2**	**34.300.000.000**		
	3.27.07.1.02.01	Sub Kegiatan Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah Diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian (dokumen)	BP3 Martapura (OKU Timur)	1	250.000.000	PAD		1	300.000.000	Penyuluhan Pertanian	Peningkatan Produktivitas, Kesejahteraan Sumber Daya Manusia (SDM) Pertanian, Perikanan dan Kepastian Pasar
		Penyediaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Praktek Pelatihan Pertanian	Jumlah kebun praktek tanaman pangan, dan hortikultura (unit)	BP3 Martapura (OKU Timur)	6	250.000.000	PAD		6	300.000.000		
	3.27.07.1.02.02	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah kelompok petani yang mendapat penyuluhan dan pemberdayaan (kelompok)	17 kab/kota	1.400	34.000.000.000	PAD		1.400	34.000.000.000	Penyuluhan Pertanian	Peningkatan Produktivitas, Kesejahteraan Sumber Daya Manusia (SDM) Pertanian, Perikanan dan Kepastian Pasar
		Peningkatan Kapabilitas Ketenagaan Penyuluh Pertanian, Tenaga PPEP	Jumlah tenaga PPEP yang ditingkatkan kapasitasnya (orang)	17 kab/kota	1.400	34.000.000.000	PAD		1.400	34.000.000.000		
	3.27.07.1.03	**Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan**	**Jumlah kelembagaan ekonomi petani yang ditingkatkan kapasitasnya (lembaga)**		**20**	**200.000.000**	PAD			**300.000.000**		
	3.27.07.1.03.06	Sub Kegiatan Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani	Jumlah korporasi petani yang dibentuk dan beroperasi (unit)	17 kab/kota	20	200.000.000	PAD		20	300.000.000	Penyuluhan Pertanian	Peningkatan Produktivitas, Kesejahteraan Sumber Daya Manusia (SDM) Pertanian, Perikanan dan Kepastian Pasar
Jumlah						**127.203.227.846**				**132.768.900.400**		

Palembang, 2024

Kepala Dinas,

Dr. Ir. H. Bambang Pramono, M.Si
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP 196703151990031004